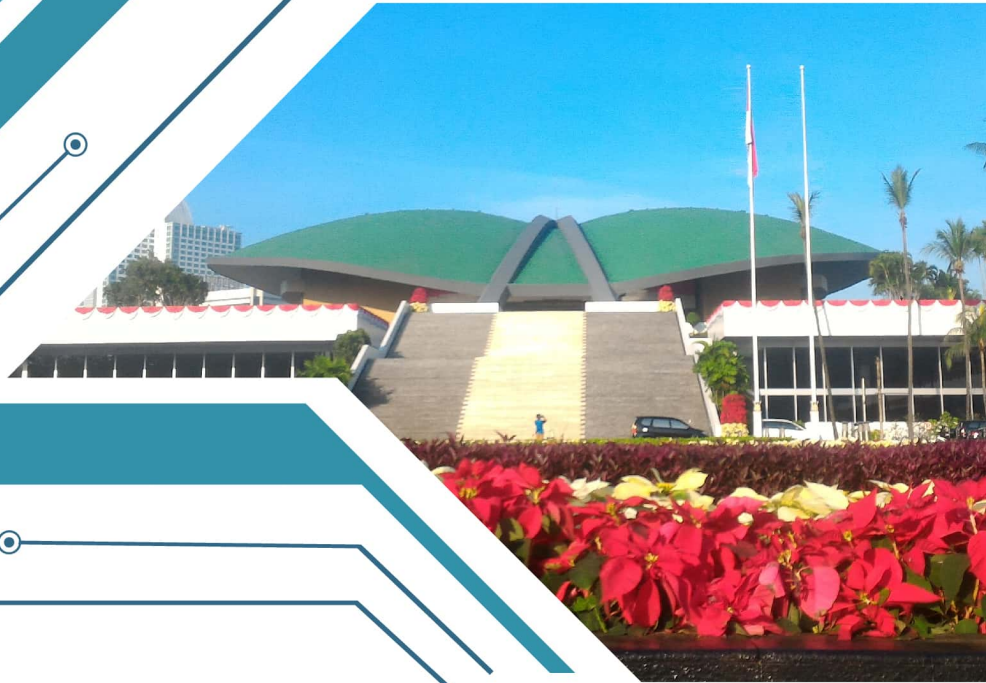




LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI





**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
TAHUN ANGGARAN 2016**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2017

Inspektur Utama,

Drs. Setyanta Nugraha, M.M

NIP. 19620719 198803 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF



Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) Tahun 2016 dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengelola anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi, tujuan, serta sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016, sekaligus sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja tahun mendatang. Selain itu laporan kinerja ini merupakan media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun anggaran 2016 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pada akhir tahun 2015, terdapat perubahan yang sangat besar dan mendasar dalam sistem pendukung DPR RI yang semula secara keseluruhan dilaksanakan oleh Setjen DPR RI kemudian dilakukan pemisahan fungsi dukungan sehingga dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka Setjen DPR RI mempunyai tugas dan fungsi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang teknis administrasi dan persidangan. Sedangkan BK DPR RI mempunyai tugas dan fungsi mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang keahlian.

Dengan terjadinya perubahan struktur organisasi maka tahun 2016 merupakan masa peralihan atau transisi yang memerlukan penataan kembali baik dari aspek sumber daya manusia, tatalaksana, maupun infrastruktur pendukungnya. Dalam hal perencanaan anggaran, dengan berakhirnya Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI Tahun 2009-2014 dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka pada tahun 2015, Setjen DPR RI telah menyusun Renstra untuk tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal (Kepsekjen) Nomor 1266/SEKJEN/2014. Akan tetapi dengan adanya perubahan struktur

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

organisasi, maka dilakukan penyusunan Renstra Setjen dan BK DPR RI tahun 2016-2019 yang ditetapkan dengan Kepsekjen Nomor 539/SEKJEN/2016. Sehingga tahun 2016 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2016-2019 setelah terbentuknya Setjen dan BK DPR RI.

Perubahan dalam struktur organisasi dan Renstra Setjen dan BK DPR RI tersebut, mengakibatkan perubahan pada Program dan Kegiatan pada tahun 2016 yang semula memiliki 6 Program meliputi 4 Program untuk Satker Dewan dan 2 Program untuk Satker Setjen, menjadi 4 Program meliputi 2 Program untuk Satker Dewan dan 2 Program untuk Satker Setjen. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Setjen dan BK DPR RI menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang setiap tahun dilakukan pengukuran. Hasil pengukuran kinerja tahun 2016 bisa dilihat dari ketercapaian sasaran strategis yang digambarkan berdasarkan ketercapaian masing-masing indikator kinerja. Pada awal Tahun 2016 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program (IKU/IKP) Setjen dan BK DPR RI 2016-2019. Sehubungan dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terhadap Renstra Setjen dan BK DPR RI 2016-2019, maka dilakukan perubahan pada IKU/IKP di lingkup Eselon I.

Untuk sasaran **meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal**, terdapat 4 (empat) indikator kinerja dan seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan. Untuk sasaran **tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui dukungan pembentukan UU yang berkualitas, pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang sesuai aspirasi masyarakat**, terdapat 1 (satu) indikator kinerja dan telah mencapai target yang ditetapkan. Untuk sasaran **terwujudnya dukungan kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat**, terdapat 1 (satu) indikator kinerja dan telah mencapai target yang ditetapkan. Untuk sasaran **menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal**, terdapat dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai target yaitu indikator Indeks kepuasan pengguna layanan, sedangkan 1 (satu) indikator lainnya belum mencapai target yaitu indikator Persentase tersedianya Naskah Akademik, draft RUU, keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di Mahkamah Konstitusi yang digunakan oleh DPR RI. Untuk sasaran **dokumen Pertimbangan Hukum dan Litigasi DPR RI**, terdapat 1 (satu) indikator kinerja dan

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

telah mencapai target yang ditetapkan. Hasil pengukuran capaian kinerja Setjen dan BK DPR RI Tahun 2016 sebagaimana pada tabel berikut.

Capaian Kinerja Setjen dan BK DPR RI Tahun 2016

No.	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja Program	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal.	Persentase materi persidangan yang digunakan oleh DPR RI.	100%
		Persentase penyelenggaraan upacara kenegaraan yang sesuai dengan SOP.	100%
		Persentase unit kerja yang menerapkan tata kelola berbasis IT.	100%
		Persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM.	123,67%
2.	Tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui dukungan pembentukan UU yang berkualitas, pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang sesuai aspirasi masyarakat	Dukungan substansi gugatan atas UU yang dimenangkan oleh DPR RI dan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	150%
3.	Terwujudnya dukungan kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat	Dukungan Peningkatan komunikasi antara anggota DPR RI dengan konstituennya dan terlaksananya diplomasi parlemen	138,75%
4.	Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	Persentase tersedianya Naskah Akademik, draft RUU, keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di Mahkamah Konstitusi yang digunakan oleh DPR RI.	85,5%
		Indeks kepuasan pengguna layanan.	121,33%

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

No.	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja Program	Capaian
5.	Dokumen Pertimbangan Hukum dan Litigasi DPR RI	Jumlah keterangan DPR dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi	104%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja di atas, maka pengukuran capaian untuk masing-masing sasaran dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Sasaran Strategis dan Persentase Capaian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal.	105,92%
2	Tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui dukungan pembentukan UU yang berkualitas, pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang sesuai aspirasi masyarakat	150%
3	Terwujudnya dukungan kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat	138,75%
4	Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	104,42%
5	Dokumen Pertimbangan Hukum dan Litigasi DPR RI	104%

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Alokasi anggaran DPR RI tahun 2016 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi Setjen dan BK DPR RI adalah sebesar 4.722.693.041.000 yang terdiri dari Satker Dewan sebesar 3.432.744.688.000 dan Satker Setjen sebesar 1.289.948.353.000. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen dan BK DPR RI dari pagu anggaran yang dialokasikan tersebut, sampai dengan Desember tahun 2016 yang dapat direalisasikan untuk Satker Dewan sebesar 2.829.299.200.825



sehingga persentase realisasi anggaran untuk Satker Dewan sebesar 82,42% dan Satker Setjen sebesar 943.755.549.810 sehingga persentase realisasi anggaran untuk Satker Setjen sebesar 73,16 %.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Setjen dan BK DPR RI secara keseluruhan, yaitu perlunya dilakukan upaya-upaya seperti

1. Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* sampai dengan level individu yang dilaksanakan dengan dukungan dan komitmen penuh dari seluruh jajaran di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, sehingga setiap tindakan individu akan dapat selaras dengan strategi organisasi.
2. Melakukan perbaikan penyusunan Renstra, penetapan IKU dan Penetapan Perjanjian Kinerja dalam forum rapat kerja.
3. Melakukan *capacity building* dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja bagi pejabat pimpinan tinggi dan pemangku jabatan di lingkungan pengawasan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan dapat diaplikasikan dalam pengelolaan kinerja.
4. Membangun aplikasi pemantauan kinerja yang mengintegrasikan aplikasi keuangan dan kinerja sehingga akan memudahkan mekanisme pemantauan kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja.
5. Monitoring dan evaluasi atas Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dan periodik secara bulanan atau triwulan.
6. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berjenjang sehingga kinerja organisasi diturunkan (*cascade*) pada level eselon II, III, IV, hingga staf.
7. Menyusun rencana aksi atas pencapaian target kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja.



PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2016 dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pembetulan Setjen dan BK DPR RI pada akhir tahun 2015 merupakan perubahan yang sangat besar dan mendasar. Sehingga pada tahun

2016 ini merupakan masa transisi dalam melakukan penataan organisasi, jabatan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarananya. Dengan segala dinamika yang ada, Setjen dan BK DPR RI sebagai suatu instansi beserta seluruh jajarannya senantiasa memberikan peningkatan kualitas kinerja dalam rangka pelaksanaan dukungan kepada DPR RI. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian kinerja tahun 2016 sebagaimana digambarkan dalam Laporan Kinerja ini.

Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa datang. Atas peran serta dan kerja keras seluruh jajaran Setjen dan BK DPR RI selama tahun 2016, yang telah memungkinkan terlaksananya tugas dan fungsi yang telah direncanakan dan ditetapkan, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Februari 2017
Plt. Sekretaris Jenderal


Achmad Djuned, SH., MHum.
NIP. 19570911 198403 1 002



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. UMUM	1
B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN	3
C. PERMASALAHAN STRATEGIS	5
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS 2016-2019.....	9
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016	14
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	16
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	18
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	57
BAB 4 PENUTUP	63

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

LAMPIRAN	66
LAMPIRAN 1	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI	4
Gambar 2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	6
Gambar 3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	6
Gambar 4	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kinerja Setjen dan BK DPR RI 2016	10
Gambar 5	Indikator Kinerja Sasaran 1	18
Gambar 6	Peta Aplikasi Setjen dan BK DPR RI	30
Gambar 7	Perbandingan Rapat Fungsi Pengawasan Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2106	39
Gambar 8	Perbandingan Anggaran yang dikelola Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2012 – 2016 (dalam ribuan)	57
Gambar 9	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Dewan dan Satker Setjen Tahun 2014, Tahun 2015, dan Tahun 2016 (dalam ribuan)	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Matrik Persandingan Pagu Anggaran Tahun 2015 dan Tahun 2016	7
Tabel 2	Persandingan Program Pada Renstra 2015-2019 dan Renstra 2016-2019	11
Tabel 3	Persandingan Sasaran, Indikator, Dan Target Kinerja Tahun 2016 Setelah Dan Sebelum Revisi	12
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Tahun 2016	14
Tabel 5	Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016	16
Tabel 6	Jumlah Rapat dan Materi Persidangan Komisi, Per Fungsi, dan Per Masa Sidang Tahun 2016 Pada Biro Persidangan I	20
Tabel 7	Rapat-Rapat Badan, Mahkamah Kehormatan Dewan dan Panitia Khusus Per Masa Sidang Tahun 2016	22
Tabel 8	Rapat-Rapat Bamus, Muspim, dan Pimpinan DPR RI Tahun 2016	23
Tabel 9	Penyiapan Materi Persidangan Yang Digunakan Anggota DPR RI Tahun 2016	24
Tabel 10	Aplikasi Yang Telah Dibangun Dan Digunakan Unit Kerja Eselon II Di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI Sampai Dengan Tahun 2016	28
Tabel 11	Jumlah Responden	32

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Tabel 12	Indeks Kepuasan Pengguna Terhadap Kualitas Dukungan SDM	33
Tabel 13	Dukungan BK DPR RI Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	37
Tabel 14	Posisi Perkara gugatan UU di MK yang ditangani Oleh DPR RI	37
Tabel 15	Jumlah Rapat Komisi di Fungsi Pengawasan Tahun 2016	38
Tabel 16	Realisasi Dukungan Peningkatan Komunikasi Antara Anggota DPR RI Dengan Konstituennya Dan Terlaksananya Diplomasi Parlemen Tahun 2016	42
Tabel 17	Dukungan Kegiatan Diplomasi Parlemen Dalam Kerjasama Bilateral	44
Tabel 18	Dukungan Kegiatan Diplomasi Parlemen Dalam Kerjasama Regional	45
Tabel 19	Dukungan Kegiatan Diplomasi Parlemen Dalam Kerjasama Internasional	46
Tabel 20	Perbandingan Target Dukungan Keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional Dalam Rangka Diplomasi Parlemen	47
Tabel 21	Tabel Capaian Naskah Akademik dan Draft RUU Tahun 2016	49
Tabel 22	Tabel Capaian kinerja Penyiapan Keterangan DPR RI ...	49
Tabel 23	Capaian Kinerja tersedianya NA dan Draf RUU serta keterangan DPR RI Tahun 2016	50
Tabel 24	Indek kepuasan pengguna layanan Badan Keahlian DPR RI	52

LAPORAN KINERJA

2016



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Tabel 25	Data Perbandingan Dukungan Setjen dan BK DPR RI dalam Litigasi Perkara di Mahkamah Konstitusi tahun 2016	55
Tabel 26	Realisasi Anggaran Setjen dan BK DPR RI per Biro/Pusat	58
Tabel 27	Realisasi Anggaran Setjen dan BK DPR RI per Indikator Kinerja	61
Tabel 28	Sasaran Strategis dan Persentase Capaian Kinerja	63

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGHARGAAN

Diterima Februari 2016



DPR RI/Setjen DPR RI telah menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Atas Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 dengan Tingkat Akurasi Tinggi

DPR RI/Setjen DPR RI telah menerima penghargaan dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Satker DPR RI NPWP :00.012.134.3-077.000 sebagai Wajib Pajak Bendahara Berkinerja Baik Dalam Pelaporan Perpajakan Untuk Tahun Pajak 2015.

DPR RI/Setjen DPR RI telah menerima penghargaan dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Satker Setjen DPR RI NPWP : 70.026.457.5-077.000 sebagai Wajib Pajak Bendahara Berkinerja Baik Dalam Pelaporan Perpajakan Untuk Tahun Pajak 2015.

DPR RI/Setjen DPR RI telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Audit Laporan Keuangan oleh BPK RI Tahun 2015.

DPR RI/Setjen DPR RI telah menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2015 dengan capaian Standar Tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Koperasi Pegawai Setjen DPR RI telah menerima penghargaan sebagai Koperasi Penerima Award Tahun 2016 dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan SK Nomor 18/Kep/M.KUKM/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016

Diterima November 2016

DPR RI/Setjen DPR RI telah menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia Atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011-2015.

DPR RI/Setjen DPR RI telah menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII sebagai Pengelolaan Data Supplier dan Kontrak Terbaik 2016 Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Jakarta VII.



1 PENDAHULUAN

A. UMUM

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) mengemban tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sesuai amanat di dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 (UU MD3). Dalam pelaksanaannya, Setjen dan BK DPR RI menyelenggarakan sistem dukungan teknis administrasi, persidangan, dan keahlian kepada DPR RI.

Sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, Setjen dan BK DPR RI berupaya melaksanakan tata kelola secara profesional sesuai dengan mekanisme berdasarkan prinsip *good governance*. Salah satu prinsip yang dipersyaratkan adalah akuntabilitas, yang bermakna instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Komitmen pemerintah dalam penguatan akuntabilitas tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 bahwa agenda kedua pembangunan nasional yang disusun sebagai penjabaran operasional dari nawacita adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yang meliputi sub agenda prioritas antara lain membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

LAPORAN KINERJA

2016



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Nepotisme. Pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Dalam hal ini maksud dari "Asas Akuntabilitas" adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan mewajibkan setiap instansi pemerintah mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sementara substansi Sistem AKIP adalah penyalarsan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (result oriented). Proses penyalarsan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategik dalam jangka menengah (5 tahun), rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan pertanggungjawaban kinerja tiap tahunnya. Penyusunan laporan kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Pelaporan kinerja mengungkapkan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Setjen dan BK DPR RI ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7/PER-SEKJEN/2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI serta amanat reformasi birokrasi khususnya area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Penyusunan LKj Setjen dan BK DPR RI Tahun 2016 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat



dalam mencapai visi dan misi, tujuan, serta sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016, sekaligus sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja tahun mendatang. Juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun anggaran 2016 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Memenuhi amanat UU MD3, Setjen DPR RI sebagai unsur pendukung DPR RI telah melaksanakan restrukturisasi organisasi. Transformasi kelembagaan unsur pendukung DPR telah mengubah nomenklatur Sekretariat Jenderal menjadi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (Setjen dan BK) DPR RI yang menekankan pada fokus fungsi pembagian dukungan kepada DPR RI secara tegas pada fungsi-fungsi dukungan yang bersifat teknis, administratif, dan keahlian. Fungsi dukungan teknis administrasi dan persidangan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dan dukungan fungsi keahlian dilaksanakan oleh Badan Keahlian.

Perubahan struktur dan ketatalaksanaan Setjen dan BK DPR RI sebagaimana diamanatkan oleh UU MD3 tersebut telah dilaksanakan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa Setjen dan BK DPR RI merupakan aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 maka ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekjen) Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016. Berdasarkan Persekjen dimaksud, Setjen DPR RI mempunyai tugas dan fungsi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang teknis

LAPORAN KINERJA

2016



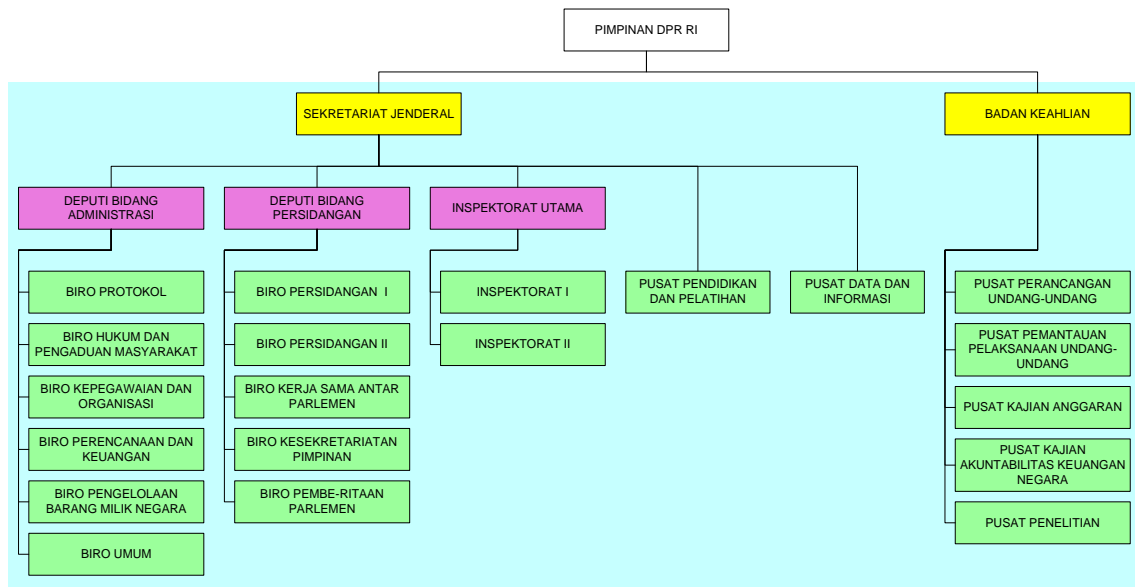
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

administrasi dan persidangan. BK DPR RI mempunyai tugas dan fungsi mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang keahlian.

Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan, dan Inspektur Utama. Sedangkan Kepala Badan Keahlian dibantu oleh Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU), Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Panlak UU), Kepala Pusat Kajian Anggaran, Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Kepala Pusat Penelitian. Setjen dan BK DPR RI melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Secara keseluruhan Setjen dan BK DPR RI merupakan satu instansi yang tertuang dalam gambar struktur fungsi sebagai berikut:

Gambar 1

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Sumber : *Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Januari 2016*



C. PERMASALAHAN STRATEGIS

Permasalahan strategis yang dihadapi Setjen dan BK DPR RI adalah dampak perubahan struktur yang terjadi pada akhir tahun 2015. Dengan adanya perubahan struktur organisasi, maka tahun 2016 merupakan masa peralihan atau transisi yang memerlukan penataan kembali baik dari aspek SDM, tatalaksana, maupun infrastruktur pendukungnya. Oleh karena itu dalam penyajian LKj ini kami tidak selalu membandingkan capaian kinerja tahun 2015 dan tahun 2016.

Langkah strategis yang ditempuh Setjen dan BK DPR RI dalam menghadapi permasalahan strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ketatalaksanaan

Dalam hal ketatalaksanaan, perubahan struktur organisasi menjadi Setjen dan BK DPR RI menyebabkan perlu dilakukannya berbagai penyesuaian terhadap peta proses bisnis Setjen dan BK DPR RI, mekanisme kerja yang diatur dalam SOP atau aturan internal lainnya, serta pengaturan tentang naskah dinas yang berlaku di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Di samping itu, perubahan struktur juga menyebabkan perubahan arah kebijakan strategis Setjen dan BK DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI yang ditindaklanjuti dengan perubahan Renstra. Implikasi atas perubahan Renstra ini maka telah dilakukan penyesuaian sarana strategis dan IKU.

2. SDM

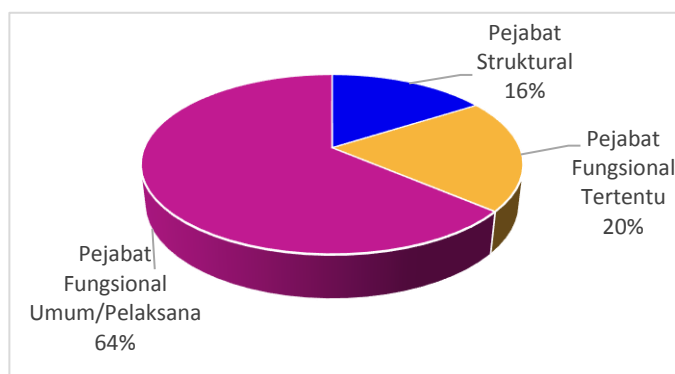
Dalam hal penataan SDM, Setjen dan BK DPR RI mulai berbenah diri dengan melaksanakan penataan jabatan sebagai dampak perubahan struktur organisasi yang selanjutnya menjadi acuan dalam melaksanakan manajemen SDM.

Sampai dengan Januari 2017, jumlah pegawai Setjen dan BK DPR RI sebanyak 1.320 orang, terdiri dari pejabat struktural 211 orang, pejabat fungsional tertentu 267 orang, dan pejabat fungsional umum 842 orang, disampaikan pada gambar berikut:



Gambar 2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



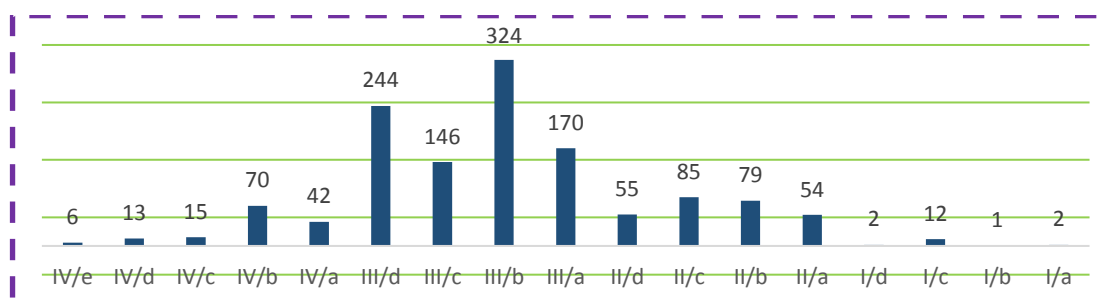
Sumber: Bagian Kepegawaian, Januari 2017

Dari gambar 2 dapat disampaikan bahwa jumlah terbanyak yaitu 64% adalah pegawai dengan jabatan fungsional umum atau pelaksana, sedangkan jumlah terkecil adalah jumlah pejabat struktural yaitu 16%. Sedangkan jumlah pejabat fungsional tertentu adalah 20%. Jika dilihat secara keseluruhan, maka kedepannya jumlah pegawai dengan jabatan fungsional tertentu masih perlu ditambah.

Selanjutnya jumlah pegawai Setjen dan BK DPR RI dapat dirinci berdasarkan pangkat/golongan sebagaimana gambar 3 berikut.

Gambar 3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan



Sumber: Bagian Kepegawaian, Januari 2017

Dari gambar di atas dapat disampaikan bahwa pegawai Setjen dan BK DPR RI paling banyak terdiri dari pegawai golongan III/b dan golongan III/d.



3. Infrastruktur dan Anggaran

Adanya penambahan unit kerja dan penggabungan unit kerja menyebabkan perlu adanya penataan infrastruktur seperti penambahan ruangan kerja, ruang rapat, dan fasilitas lainnya. Proses pengadaan infrastruktur tersebut memerlukan waktu dan dilakukan secara bertahap.

Selanjutnya, dari sisi dukungan anggaran, pada tahun 2016 Setjen dan BK DPR RI mengelola anggaran sebesar Rp 4.722.693.041.000 yang terdiri dari 2 Satuan Kerja (Satker), yaitu: (1) Satker Setjen DPR RI sebesar Rp. 1.289.948.353.000 (Satu Trilyun Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah); dan (2) Satker Dewan sebesar Rp. 3.432.744.688.000 (Tiga Trilyun Empat Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Anggaran ini menurun 9,033% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1
Matrik Persandingan Pagu Anggaran DPR RI
Tahun 2015 dan Tahun 2016

No.	SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN	
		TAHUN 2015 (Rp)	TAHUN 2016 (Rp)
1.	SATKER DEWAN	3.766.105.172.000	3.432.744.688.000
2.	SATKER SETJEN	1.425.563.516.000	1.289.948.353.000
	JUMLAH	5.191.668.688.000	4.722.693.041.000
	PENURUNAN		468.975.647.000

Sumber: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Januari 2017

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa Setjen dan BK DPR RI disamping mengelola anggaran Satker Setjen, juga mengelola anggaran Satker Dewan. Anggaran Satker Dewan merupakan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Dewan maupun kegiatan Setjen dan BK DPR RI dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Komitmen Setjen dan BK DPR RI untuk melaksanakan pengelolaan anggaran dengan akuntabel dan transparan

LAPORAN KINERJA

2016



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

mendapatkan penghargaan dari BPK atas capaian Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” untuk Laporan Keuangannya. Prestasi tersebut terus dipertahankan Setjen dan BK dengan keberhasilan capaian Opini WTP sebanyak 6 kali berturut-turut, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Untuk Laporan Keuangan Setjen dan BK tahun anggaran 2016 belum mendapatkan penilaian dari BPK.



2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS 2016 – 2019

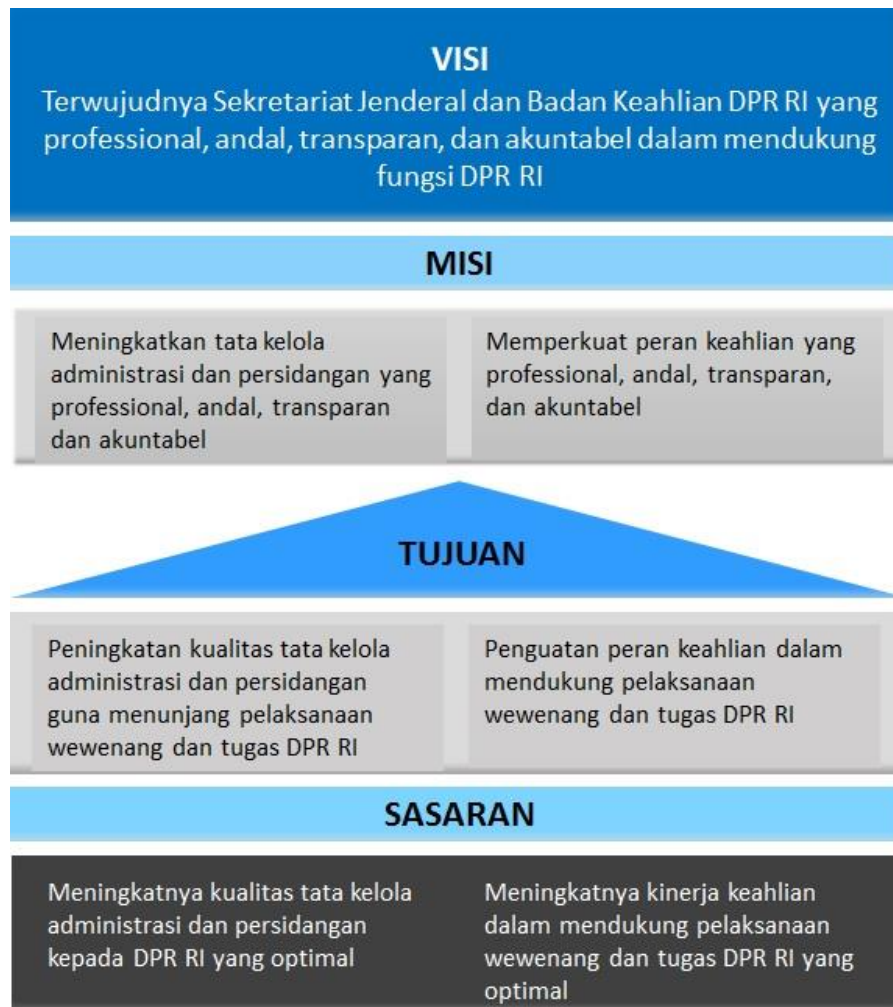
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka Setjen DPR RI telah menyusun Renstra untuk tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal (Kepsekjen) Nomor 1266/SEKJEN/2014. Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka ditetapkan Renstra Setjen dan BK DPR RI tahun 2016-2019 dengan Kepsekjen Nomor 539/SEKJEN/2016. Renstra tersebut merupakan cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di empat tahun ke depan.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kinerja Setjen dan BK DPR RI dapat dilihat pada gambar 4 berikut.



Gambar 4

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kinerja Setjen dan BK DPR RI 2016



Perubahan dalam struktur organisasi dan Renstra Setjen dan BK DPR RI tersebut mengakibatkan perubahan Program dan Kegiatan yang ada. Perubahan yang mendasar adalah perubahan Program DPR RI yang semula berjumlah 6 Program, meliputi Satker Dewan 4 Program dan Satker Setjen 2 Program, menjadi 4 Program DPR RI, meliputi Satker Dewan 2 Program dan Satker Setjen dan BK DPR RI 2 Program pada tahun 2016. Persandingan perubahan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.



Tabel 2

**Persandingan Program
Pada Renstra 2015-2019 dan Renstra 2016-2019**

PROGRAM PADA RENSTRA 2015-2019		PROGRAM PADA RENSTRA 2016-2019	
DEWAN		DEWAN	
1	Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI	1	Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI
2	Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI	2	Program Penguatan Kelembagaan DPR RI
3	Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI		
4	Program Penguatan Kelembagaan DPR RI		
SETJEN		SETJEN DAN BADAN KEAHLIAN	
1	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	1	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI	2	Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan

Dalam tabel di atas, Setjen dan BK DPR RI menetapkan dua program kerja, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI; dan
2. Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan.

Kedua program tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja. Pada awal tahun 2016 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program (IKU/IKP) Setjen dan BK DPR RI 2016-2019. Sehubungan dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terhadap Renstra Setjen dan BK DPR RI tahun 2016-2019, maka dilakukan perubahan pada IKU/IKP di lingkup eselon I. Jumlah IKU/IKP pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI yang semula tujuh indikator menjadi empat indikator. Sedangkan, untuk IKU/IKP pada Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan tetap dua indikator dengan narasi IKU/IKP yang berbeda. Perubahan IKU/IKP Setjen dan BK DPR RI dapat dilihat dalam tabel 3.



Tabel 3

**Persandingan Sasaran, Indikator, Dan Target Kinerja
Tahun 2016 Setelah Dan Sebelum Revisi**

Sasaran, Indikator, Dan Target Kinerja Tahun 2016			Sasaran, Indikator, Dan Target Kinerja 2016 Setelah Revisi		
Sasaran Program/ Outcome	Indikator Kinerja Program	Target	Sasaran Program/ Outcome	Indikator Kinerja Program	Target
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal.	Terfasilitasinya persidangan Komisi-komisi, Paripurna, BURT, Banggar, Bamus, Baleg, MKD, BKSAP, dan Pimpinan DPR RI, serta terselenggaranya pemberitaan parlemen secara baik	95%	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal.	Persentase materi persidangan yang digunakan oleh DPR RI	100%
	Tersedianya dukungan teknis dan administrasi, serta sarana dan prasarana yang memadai	90%		Persentase penyelenggaraan upacara kenegaraan yang sesuai dengan SOP	100%
	Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti secara baik	85%		Persentase unit kerja yang menerapkan tata kelola berbasis IT	90%
	Tersedianya referensi kepustakaan, infrastruktur teknologi informasi, kearsipan dan museum, risalah rapat persidangan, serta terselenggaranya pendidikan dan pelatihan SDM	90%		Persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM	60%
	Mempertahankan hasil opini BPK berupa "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP)	100%			
	Meningkatnya penilaian LAKIP	B			
	Indeks kepuasan pengguna layanan	2,5 (Skala 5)			

LAPORAN KINERJA

2016



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Sasaran, Indikator, Dan Target Kinerja Tahun 2016			Sasaran, Indikator, Dan Target Kinerja 2016 Setelah Revisi		
Sasaran Program/ Outcome	Indikator Kinerja Program	Target	Sasaran Program/ Outcome	Indikator Kinerja Program	Target
Tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui dukungan pembentukan UU yang berkualitas, pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang sesuai aspirasi masyarakat	Dukungan substansi gugatan atas UU yang dimenangkan oleh DPR RI dan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	60%	Tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui dukungan pembentukan UU yang berkualitas, pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang sesuai aspirasi masyarakat	Dukungan substansi gugatan atas UU yang dimenangkan oleh DPR RI dan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	60%
Terwujudnya dukungan kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat	Dukungan Peningkatan komunikasi antara Anggota DPR RI dengan konstituennya dan terlaksananya diplomasi parlemen	80%	Terwujudnya dukungan kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat	Dukungan Peningkatan komunikasi antara Anggota DPR RI dengan konstituennya dan terlaksananya diplomasi parlemen	80%
Menguatnya Kinerja Keahlian di Bidang Kedewanan yang Optimal	Persentase tersedianya Naskah Akademik/Draft Awal RUU/Kajian/Analisis/Referensi/Laporan di bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan serta isu-isu yang terkait Kedewanan	70%	Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	Persentase tersedianya Naskah Akademik, draft RUU, keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di Mahkamah Konstitusi yang digunakan oleh DPR RI	100%
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	2,5 (Skala 5)		Indeks kepuasan pengguna layanan	60%

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Sasaran, Indikator, Dan Target Kinerja Tahun 2016			Sasaran, Indikator, Dan Target Kinerja 2016 Setelah Revisi		
Sasaran Program/ Outcome	Indikator Kinerja Program	Target	Sasaran Program/ Outcome	Indikator Kinerja Program	Target
Dokumen Pertimbangan Hukum dan Litigasi DPR RI	Jumlah keterangan DPR dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi	50 Perka ra	Dokumen Pertimbangan Hukum dan Litigasi DPR RI	Jumlah keterangan DPR dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi	50 Perka ra

Terkait dengan Renstra Setjen dan BK DPR RI tersebut, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016, sebagaimana dalam lampiran 1.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perumusan ulang sasaran serta indikator kinerja dimaksudkan agar organisasi memiliki bidikan sasaran kinerja yang jelas, dengan indikator kinerja yang terukur sehingga produktivitas kerja diharapkan makin tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pimpinan Setjen dan BK DPR RI menetapkan perjanjian kinerja sesuai dengan indikator yang telah disempurnakan. Perjanjian kinerja tersebut disampaikan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4
Perjanjian Kinerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Tahun 2016

No.	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal.	Persentase materi persidangan yang digunakan oleh DPR RI.	100%
		Persentase penyelenggaraan upacara kenegaraan yang sesuai dengan SOP.	100%
		Persentase unit kerja yang menerapkan tata kelola berbasis IT.	90%

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

		Persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM.	60%
2.	Tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui dukungan pembentukan UU yang berkualitas, pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang sesuai aspirasi masyarakat	Dukungan substansi gugatan atas UU yang dimenangkan oleh DPR RI dan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	60%
3.	Terwujudnya dukungan kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat	Dukungan Peningkatan komunikasi antara Anggota DPR RI dengan konstituennya dan terlaksananya diplomasi parlemen	80%
4.	Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	Persentase tersedianya Naskah Akademik, draft RUU, keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di Mahkamah Konstitusi yang digunakan oleh DPR RI.	100%
		Indeks kepuasan pengguna layanan.	60%
5.	Dokumen Pertimbangan Hukum dan Litigasi DPR RI	Jumlah keterangan DPR dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi	50 Perkara



3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Gambaran pengukuran capaian kinerja Setjen dan BK DPR RI Tahun 2016 sebagaimana tabel 5 berikut.

Tabel 5
Pengukuran Capaian Kinerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016

No.	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal.	Persentase materi persidangan yang digunakan oleh DPR RI.	100%	100%	100%
		Persentase penyelenggaraan upacara kenegaraan yang sesuai dengan SOP.	100%	100%	100%
		Persentase unit kerja yang menerapkan tata kelola berbasis IT.	90%	90%	100%
		Persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM.	60%	73,36%	122,27%

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

No.	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
2.	Tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui dukungan pembentukan UU yang berkualitas, pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang sesuai aspirasi masyarakat	Dukungan substansi gugatan atas UU yang dimenangkan oleh DPR RI dan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	60%	90%	150%
3.	Terwujudnya dukungan kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat	Dukungan Peningkatan komunikasi antara Anggota DPR RI dengan konstituennya dan terlaksananya diplomasi parlemen	80%	111%	138,75%
4.	Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	Persentase tersedianya Naskah Akademik, draft RUU, keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di Mahkamah Konstitusi yang digunakan oleh DPR RI.	100%	85,5%	85,5%
		Indeks kepuasan pengguna layanan.	60%	72,65%	121,08%
5.	Dokumen Pertimbangan Hukum dan Litigasi DPR RI	Jumlah keterangan DPR dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi	50 Perkara	52 perkara	104%



B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran Tahun 2016 dari Setjen dan BK DPR RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN → → → 1

Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal.

Sasaran 1 mempunyai 4 indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5 berikut.

Gambar 5

Indikator Kinerja Sasaran 1





INDIKATOR 1.1

Persentase materi persidangan yang digunakan oleh DPR RI.

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
100%	100%	100%

Dalam IKU ini yang dimaksud dengan materi persidangan adalah materi berupa dukungan teknis administrasi persidangan yang disiapkan oleh Setjen DPR RI berupa dokumen yang diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan rapat-rapat terkait fungsi DPR RI. Adapun materi persidangan yang disiapkan oleh Setjen DPR RI berupa kelengkapan penyelenggaraan rapat, yaitu surat undangan, daftar hadir peserta rapat, rekapitulasi daftar hadir, skenario rapat, pointers rapat, dan penyiapan bahan rapat yaitu dokumen substansi, draft kesimpulan rapat, laporan singkat, dan risalah rapat.

Target IKU "Persentase materi persidangan yang digunakan oleh DPR RI" yang ingin dicapai pada tahun 2016 adalah sebesar 100%, dan telah terealisasi sebesar 100%, sehingga diperoleh nilai capaian 100%. Capaian kinerja sebesar 100% berarti bahwa seluruh rapat didukung dengan kelengkapan rapat dan materi persidangan yang disiapkan oleh Setjen DPR RI dan seluruhnya digunakan oleh Anggota DPR RI. Dukungan penyiapan materi persidangan merupakan keharusan yang dilakukan tepat pada waktunya.

Penyiapan materi persidangan disiapkan oleh jajaran Deputi Bidang Persidangan yaitu Biro Persidangan I yang meliputi Sekretariat Komisi I s.d. XI dan Persidangan Paripurna, dan Biro Persidangan II yang meliputi Sekretariat Badan-badan, Mahkamah dan Pansus, serta Biro Pimpinan yang meliputi Sekretariat Musyawarah Pimpinan, Badan Musyawarah, Tata Usaha Pimpinan DPR RI.

Pada tahun 2016 jumlah rapat-rapat dalam persidangan DPR RI atau jumlah dukungan materi persidangan dari jajaran Biro Persidangan I tertuang dalam tabel 6 berikut.

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

1. Biro Persidangan 1

Tabel 6
Jumlah Rapat dan Materi Persidangan Komisi, Per Fungsi, dan Per Masa Sidang Tahun 2016 Pada Biro Persidangan I

RAPAT KOMISI FUNGSI LEGISLASI

NO.	MASA SIDANG	KOMISI											JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	MS III	5	-	2	12	12	9	8	19	14	-	50	131
2	MS IV	6	10	5	1	3	3	5	6	3	5	11	58
3	MS V	6	11	2	7	5	3	5	6	10	10	37	102
4	MS I	22	14	6	8	14	4	10	5	16	9	-	108
5	MS II	9	-	4	2	5	-	5	1	2	8	-	36
JUMLAH RAPAT		48	35	19	30	39	19	33	37	45	32	98	435

RAPAT KOMISI FUNGSI ANGGARAN

NO.	MASA SIDANG	KOMISI											JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	MS III	-	-	-	-	-	-	2	14	-	-	1	17
2	MS IV	1	-	5	-	-	8	-	-	-	2	-	16
3	MS V	11	13	11	8	19	31	30	18	17	26	12	196
4	MS I	19	9	4	15	16	9	18	14	10	26	20	160
5	MS II	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	12	17
JUMLAH RAPAT		31	22	20	23	35	53	50	46	27	54	45	406

RAPAT KOMISI FUNGSI PENGAWASAN

NO.	MASA SIDANG	KOMISI											JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	MS III	35	28	16	11	11	30	26	28	41	49	9	284
2	MS IV	5	4	10	10	10	18	9	19	16	15	3	119
3	MS V	21	8	3	6	16	28	7	12	29	31	3	164
4	MS I	23	12	34	8	23	22	10	11	34	31	7	215
5	MS II	12	9	17	11	10	7	7	3	7	17	5	105
JUMLAH RAPAT		96	61	80	46	70	105	59	73	127	143	27	887
TOTAL JUMLAH RAPAT		175	118	119	99	144	177	142	156	199	229	170	1728

Sumber: Rekapitulasi kegiatan persidangan tahun 2016 dari Komisi dan Paripurna

Secara detail dari tabel di atas dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- jumlah rapat-rapat DPR RI yang dilakukan oleh Komisi I sd Komisi XI pada Masa Persidangan III, IV, V, I, II dalam melaksanakan fungsi Legislatif sebanyak 435 kali rapat dan didukung dengan 435 materi persidangan;



- b. jumlah rapat-rapat DPR yang dilakukan oleh Komisi I sd Komisi XI pada Masa Persidangan III, IV, V, I, II dalam melaksanakan fungsi Anggaran sebanyak 406 kali rapat dan didukung dengan 406 materi persidangan;
- c. jumlah rapat-rapat DPR yang dilakukan oleh Komisi I sd Komisi XI pada Masa Persidangan III, IV, V, I, II dalam melaksanakan fungsi Pengawasan sebanyak 337 dan didukung 337 materi persidangan.

Selain itu, untuk Rapat Paripurna pada tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 35 rapat paripurna dan didukung 35 materi persidangan.

Berdasarkan tabel dan uraian di atas, maka materi persidangan yang telah disiapkan oleh Setjen cq Biro Persidangan I sebanyak 1763 dokumen yang terdiri dari 1728 dukungan materi persidangan pada rapat-rapat di Komisi dalam rangka pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, serta 35 dukungan materi persidangan dalam rapat paripurna DPR RI. Dengan terlaksananya rapat-rapat tersebut, maka dengan target 100% materi persidangan yang disiapkan oleh Setjen DPR RI cq Biro Persidangan telah terealisasi digunakan seluruhnya oleh Anggota DPR RI dalam rapat Komisi-komisi dan paripurna dengan nilai capaian 100%.

2. Biro Persidangan II

Biro persidangan II mempunyai tugas menyiapkan materi persidangan dalam rapat Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Panitia Khusus. Pada tahun 2016 jumlah rapat-rapat DPR RI yang seluruhnya mendapatkan dukungan materi persidangan dari jajaran Biro Persidangan II dapat dilihat pada tabel 7 berikut.



Tabel 7
Rapat-Rapat Badan, Mahkamah Kehormatan Dewan dan Panitia Khusus
Per Masa Sidang Tahun 2016

RAPAT BALEG DAN PANSUS DALAM FUNGSI LEGISLASI

NO.	MASA SIDANG	BULAN												JUMLAH PER MASA SIDANG
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	MS III	43	61	15										119
2	MS IV				21									21
3	MS V					27	29	11						67
4	MS I								10	27	21			58
5	MS II											11	3	14
JUMLAH RAPAT PER BULAN		43	61	15	21	27	29	11	10	27	21	11	3	279

RAPAT BURT DAN BANGGAR DALAM FUNGSI ANGGARAN

NO.	MASA SIDANG	BULAN												JUMLAH PER MASA SIDANG
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	MS III	2	5	3										10
2	MS IV													
3	MS V						19	15						34
4	MS I								4	10	16			20
5	MS III													
JUMLAH PER BULAN		2	5	3			19	15	4	10	16			64

RAPAT MKD DALAM FUNGSI PENGAWASAN

NO.	MASA SIDANG	BULAN												JUMLAH RAPAT PER MASA SIDANG
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	MS III	9	14	9										32
2	MS IV				7									7
3	MS V					6	7	4						17
4	MS I								6	10	4			20
5	MS II											8	7	15
JUMLAH RAPAT PER BULAN		9	14	9	7	6	7	4	6	10	4	8	7	91

Sumber: Rekapitulasi kegiatan persidangan tahun 2016 dari BURT, Baleg, Banggar, MKD, dan Pansus

Berdasarkan tabel di atas, materi persidangan yang telah disiapkan oleh Setjen cq jajaran Biro Persidangan II sebanyak 434 materi persidangan yang terdiri dari 279 materi persidangan pada pelaksanaan rapat-rapat fungsi legislasi, 64 materi persidangan



pada rapat-rapat pelaksanaan fungsi anggaran dan 91 materi persidangan pada rapat-rapat pelaksanaan fungsi pengawasan. Target penyiapan materi persidangan 100 % telah teralisasi dan telah digunakan sebesar 100% dalam rapat Badan-badan, Mahkamah dan Pansus tahun 2016. Dengan demikian didapat nilai capaian kinerja 100%.

3. Biro Pimpinan

Biro Pimpinan mempunyai tugas menyiapkan materi persidangan dalam rapat-rapat Pimpinan DPR RI, Badan Musyawarah, dan Musyawarah Pimpinan. Pada tahun 2016 jumlah rapat-rapat DPR RI yang seluruhnya mendapatkan dukungan materi persidangan dari jajaran Biro Pimpinan dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 8
Rapat-Rapat Bamus, Muspim, dan Pimpinan DPR RI
Tahun 2016

NO	Alat Kelengkapan	Jumlah Rapat/Kegiatan
1.	Badan Musyawarah (Bamus dan Pengganti Bamus)	33
2.	Musyawarah Pimpinan (Rapim, Konsultasi Pimpinan, Konsultasi dengan Presiden)	66
3.	Pimpinan DPR (Ketua dan Wakil Ketua):	11
4.	Pertemuan Persahabatan dengan Tamu Asing	60
5.	Pertemuan dengan Tamu Dalam Negeri	142
6.	Pertemuan dengan Delegasi Masyarakat	83
	TOTAL	395

Berdasarkan tabel di atas, maka materi persidangan yang telah disiapkan oleh Setjen DPR RI cq Biro Pimpinan sebanyak 395 materi persidangan dan telah digunakan dalam rapat-rapat dan pertemuan Musyawarah Pimpinan, Badan Musyawarah, dan Pimpinan DPR RI. Dengan demikian maka dengan target 100% telah direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja penyiapan materi persidangan oleh Biro Pimpinan tercapai 100%.

Dari tabel 6, tabel 7, dan tabel 8 di atas, maka dapat disampaikan bahwa tugas dan fungsi penyiapan materi



persidangan yang harus dilakukan oleh Setjen DPR RI cq. jajaran Deputy Persidangan pada tahun 2016 adalah 2592 materi persidangan. Jumlah tersebut secara keseluruhan telah digunakan dalam rapat-rapat alat kelengkapan DPR RI dalam melaksanakan ketiga fungsinya. Hal tersebut tertuang dalam tabel 9 berikut.

Tabel 9

**Penyiapan Materi Persidangan
Yang Digunakan Anggota DPR RI Tahun 2016**

No	NAMA UNIT	JUMLAH RAPAT DAN MATERI PERSIDANGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Biro Persidangan I	1763	100%	100%	100%
2	Biro Persidangan II	434	100%	100%	100%
3	Biro Pimpinan	395	100%	100%	100%
	Jumlah	2592	100%	100%	100%

Tercapainya persentase materi persidangan yang digunakan oleh DPR RI pada tahun 2016 sebesar 100% didukung dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Setjen DPR RI seperti SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran yang memadai. Namun demikian perlu peningkatan dalam hal kualitas materi persidangan yang disiapkan.

Hal tersebut kami sampaikan, mengingat masih ditemukan beberapa kendala diantaranya adalah jumlah rapat yang begitu banyak, SDM yang belum memadai, dan mobilitas rapat-rapat DPR RI yang begitu tinggi, serta waktu penyiapan materi persidangan yang sangat singkat ikut mempengaruhi kualitas materi persidangan.

Kedepan Setjen DPR RI harus terus berupaya untuk meningkatkan dukungan penyiapan materi persidangan yang lebih cepat dan efisien dengan mengembangkan Sistem Informasi Persidangan berbasis IT sehingga materi persidangan dapat diakses melalui jaringan intranet, sekaligus juga dapat meminimalkan penggunaan kertas.



INDIKATOR 1.2

Persentase penyelenggaraan upacara kenegaraan yang sesuai dengan SOP.

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
100%	100%	100%

“Persentase penyelenggaraan upacara kenegaraan yang sesuai dengan SOP” ditetapkan sebagai IKU karena kegiatan ini dapat mendukung Setjen dan BK DPR RI terus meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal dengan menyelenggarakan upacara kenegaraan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Disamping itu upacara kenegaraan sangat sakral bagi bangsa Indonesia dan harus diselenggarakan dengan sangat aman dan lancar sehingga memerlukan pedoman, aturan penyelenggaraan upacara.

Upacara kenegaraan yang didukung penyelenggaraannya oleh Setjen DPR RI yaitu:

1. Upacara Kenegaraan Pada Rapat Paripurna DPR RI Dalam Rangka Penyampaian Rancangan UU tentang APBN oleh Presiden RI, dan
2. Sidang Bersama DPR dan DPD RI dengan Acara Pidato Kenegaraan Presiden RI Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI.

Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RUU APBN pada rapat Paripurna DPR RI menunjukkan DPR RI sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang Anggaran dan Legislasi. Dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan di depan DPR RI dan DPD RI untuk memperingati momentum bersejarah dimana Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.

Kedua rapat Paripurna tersebut menjadi perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia karena dihadiri oleh seluruh unsur pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, unsur elemen masyarakat seperti teladan, serta tamu kehormatan dari negara sahabat. Agar dapat diselenggarakan dengan lancar dan sukses maka telah disusun 2 (dua) SOP sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris



Jenderal DPR RI Nomor 1603/SEKJEN/2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, yaitu:

1. SOP Rapat Paripurna dalam rangka Pidato Presiden Penyampaian RUU APBN; dan
2. SOP Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI.

Dengan SOP tersebut, maka Setjen DPR RI mempunyai pedoman yang baku dalam hal koordinasi internal maupun eksternal, melakukan pembagian tugas yang dikoordinir oleh Sekjen DPR RI, penyiapan bahan, tata acara dan tata tempat kenegaraan dengan lebih baik dan terorganisir. Hal tersebut juga didukung dengan keputusan Sekjen tentang Tim Kerja Dukungan Persiapan dan Pelaksanaan Rapat Paripurna.

Tata kelola administrasi dan persidangan khususnya dalam penyelenggaraan upacara kenegaraan oleh Setjen DPR RI, telah dilaksanakan sesuai dengan kedua SOP. Dengan target kinerja sebesar 100%, dapat terealisasi sebesar 100%, dengan demikian capaian IKU ini sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian IKU dipengaruhi juga oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- a. tersedianya dukungan anggaran yang memadai
- b. tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerjasama yang baik dalam mencapai target kinerja
- c. terjalinnya koordinasi yang intensif baik internal maupun instansi terkait dalam rangka perencanaan persiapan serta pelaksanaan acara.

Walaupun sudah mencapai 100%, namun dari sisi kualitas penyelenggaraan, kegiatan ini perlu ditingkatkan dengan menyusun SOP-SOP lainnya sebagai pendukung, misalnya SOP tentang Tata Ruang Acara Kenegaraan; SOP tentang Tata Warkat Acara Kenegaraan; SOP tentang Penyusunan Skenario Rapat; SOP tentang Pengamanan; dan lain-lain dengan unit dan instansi terkait.

Optimalisasi penyelenggaraan acara kenegaraan di DPR RI juga perlu dilakukan terhadap sarana dan prasarana karena dirasakan memiliki keterbatasan kapasitas, khususnya di bagian korps diplomatik, tamu kehormatan dan bahkan disisi anggota rapat. Keterbatasan



kapasitas gedung paripurna tersebut karena memang gedung tersebut dibangun untuk keperluan kegiatan CONEFO (*Conference of New Emerging Forces*) tahun 1965, sehingga perlu pengaturan ulang mengenai tata ruang dan tata tempat sehingga kapasitasnya dapat dioptimalkan untuk setiap kegiatan kenegaraan agar dapat berjalan dengan tertib, dan lancar.

INDIKATOR 1.3

Persentase unit kerja yang menerapkan tata kelola berbasis IT.

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
90%	90%	100%

Dalam mendukung DPR RI menuju parlemen modern Setjen dan BK DPR RI dituntut untuk mempercepat proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi perkantoran, dan modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan penggunaan teknologi informasi. Walaupun tidak secara nyata tertulis dalam visi dan misi Rencana Strategis Setjen dan BK DPR RI 2016 – 2019, akan tetapi terkait pengelolaan teknologi informasi dalam sasaran dan arah kebijakan Setjen dan BK DPR RI telah mengamanatkan peningkatan kualitas tata kelola dan infrastruktur teknologi informasi (IT).

Sesuai dengan misinya meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel, maka Setjen dan BK DPR RI berupaya maksimal mengembangkan tata kelola berbasis IT yang baik dalam proses bisnis internal organisasi. Tugas pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem IT di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dilaksanakan oleh Bidang Data dan Teknologi informasi dibawah Pusat Data dan Informasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi secara umum menggunakan pendekatan sentralisasi, tetapi untuk sistem tertentu diterapkan kebijakan desentralisasi *content up-dating* sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing unit pelaksana. Kebijakan sentralisasi dilakukan untuk sistem administrasi umum, sistem administrasi kepegawaian, pengelolaan website utama, sistem evaluasi dan monitoring terintegrasi, dan sistem informasi keuangan.

LAPORAN KINERJA

2016



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Dengan demikian, secara umum seluruh unit kerja di Setjen dan BK DPR RI telah melaksanakan tata kelola berbasis IT. Namun maksud dari IKU "Persentase unit kerja yang menerapkan tata kelola berbasis IT" diukur dari perbandingan jumlah unit kerja yang memiliki aplikasi teknis untuk mendukung tupoksinya dengan jumlah seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Jumlah unit kerja eselon II di lingkungan Setjen dan BK DPR RI adalah sebanyak 20 unit kerja, dari jumlah tersebut, pada tahun 2016 sebanyak 18 unit kerja telah memiliki aplikasi IT untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, atau terealisasi sebesar 90%. Sedangkan sebanyak 2 unit eselon II lainnya masih dalam proses pembahasan pengajuan pengembangan sistem informasi, yaitu Biro Protokol dan Pusat Panlak UU. Realisasi tersebut sama dengan target kinerja sebesar 90%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator "Persentase unit kerja yang menerapkan tata kelola berbasis IT" adalah 100%. Adapun unit eselon II di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang telah memiliki dan menerapkan IT dalam melaksanakan tupoksinya dengan pembangunan aplikasi dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10
Aplikasi Yang Telah Dibangun Dan Digunakan Unit Kerja Eselon II
Di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI Sampai Dengan Tahun 2016

NO.	UNIT KERJA ESELON II	JUMLAH	APLIKASI
1.	Biro Umum	4	1. Tata Pesuratan 2. Pelayanan kesehatan 3. Kendaraan 4. Sistem informasi Pamdal
2.	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Sistem Informasi Perbendaharaan (SIP)
3.	Biro Perencanaan dan Keuangan	11	1. Gaji anggota 2. Perjalanan dinas 3. Perencanaan 4. Semar 5. Pajak 6. Matrik Tim 7. Standar SBM dan SBU 8. Money 9. Administrasi keuangan 10. Uang makan 11. Tunjangan kinerja
4.	Biro Kepegawaian dan Organisasi	14	1. Administrasi anggota Dewan 2. Sistem Administrasi Kepegawaian (SIAP) 3. Catatan harian 4. E-PPKP 5. Absensi 6. Tata naskah dinas 7. e-disiplin PNS

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

NO.	UNIT KERJA ESELON II	JUMLAH	APLIKASI
			8. Panitia seleksi 9. System informasi penilaian angka kredit 10. Buku putih 11. Ortala 12. Evaluasi jabatan 13. Analisa jabatan 14. Analisa beban kerja
5.	Biro hukum dan Pengaduan Masyarakat	3	1. Pengaduan Masyarakat 2. SMS Aspirasi 3. JDIH
6.	Biro Persidangan I	2	1. Anggota Dewan 2. Portal Anggota Dewan
7.	Biro Persidangan II	1	Database Badan Kehormatan
8.	Biro Kerjasama Antar Parlemen	1	Event BKSAP
9.	Biro Kesekretariatan Pimpinan	4	1. Sistem Administrasi Keanggotaan 2. Adminstrasi surat TU sekjen 3. Registrasi online calon TA/AS 4. Cloud DPR (file sharing)
10.	Biro Pemberitaan Parlemen	5	1. Website dpr.go.id 2. Layanan informasi public 3. TV dan radio parlemen 4. Data base analisis berita 5. Agenda Sidang
11.	Inspektorat I	3	1. Ittama 2. e- Lakip 3. Aplikasi Elit
12.	Inspektorat II	1	Whistle Blowing System
13.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	2	1. Sidiklat 2. Pusdiklat Parlemen
14.	Pusat Data dan Informasi	8	1. Perpustakaan SLIM 2. e-kliping 3. e-Repository Perpustakaan 4. e-paper 5. e-perpus 6. arsip dan dokumentasi 7. Aplikasi mobile 8. Sistem informasi administrasi dokumentasi (SIAD)
15.	Pusat Panlak UU	2	1. Sistem informasi legislasi (sileg) 2. Pusat PUU
16.	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	2	1. Bakn 2. Pusat kajian AKN
17.	Pusat Kajian Anggaran	1	Puskaji Anggaran
18.	Pusat Penelitian	2	1. Pusat penelitian 2. E-jurnal puslit
	Jumlah Seluruhnya		67 Aplikasi

LAPORAN KINERJA

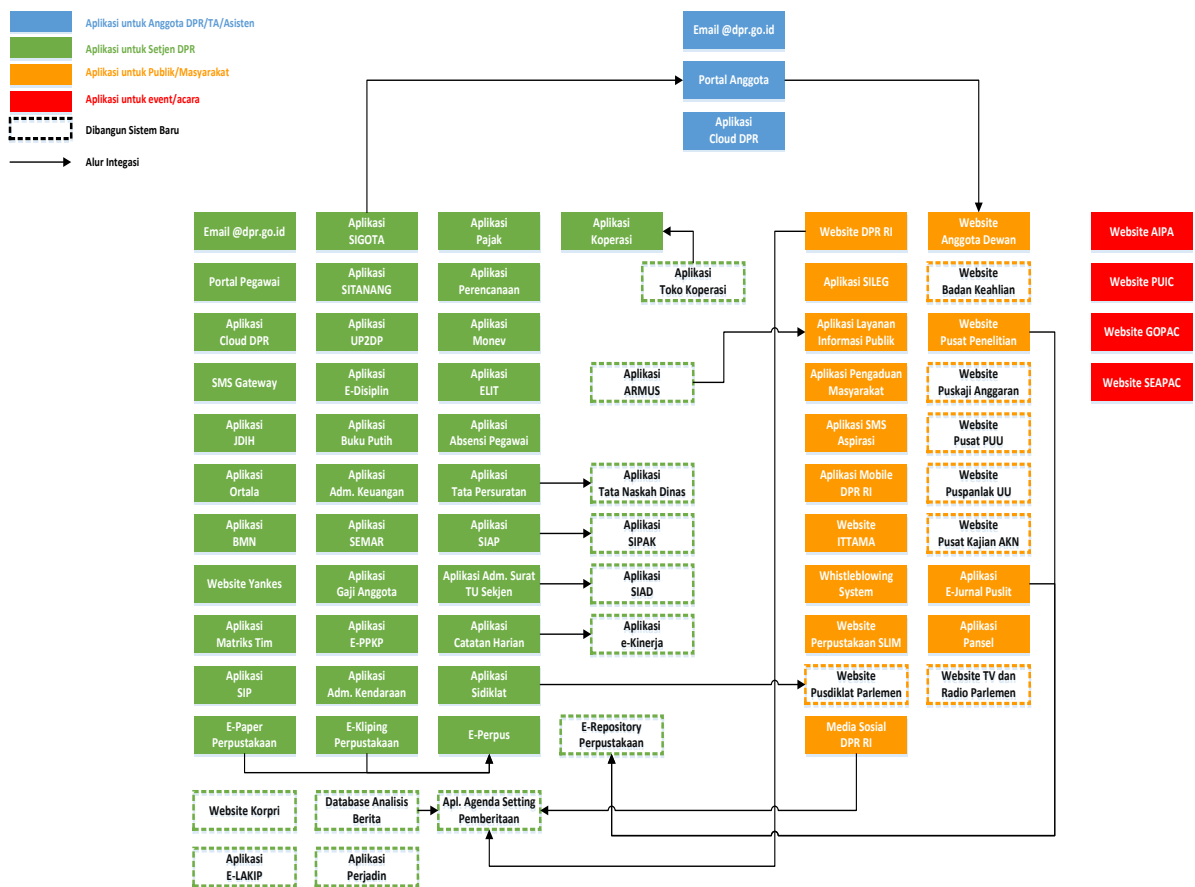
2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Untuk pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi tersebut, sampai dengan tahun 2016 Setjen dan BK DPR RI telah membangun aplikasi dengan peta sebagaimana gambar 6 berikut.

Gambar 6
Peta Aplikasi Setjen dan BK DPR RI



Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, sebagai berikut :

1. komitmen dan dukungan dari pimpinan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dalam pengembangan teknologi informasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. komitmen para pejabat/pegawai dalam menerapkan tata kelola berbasis IT secara optimal;
3. tersedianya dukungan anggaran yang memadai;
4. tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerjasama yang baik dalam mencapai target kinerja;



5. tersedianya sarana dan prasarana yang memadai; dan
6. adanya SOP dalam menjalankan pekerjaan.

Dengan target kinerja sebesar 90% dan realisasi sebesar 90% serta capaian kinerja sebesar 100%, maka pada tahun mendatang Setjen dan BK DPR RI perlu meningkatkan targetnya menjadi 100% sehingga seluruh unit setingkat eselon II mempunyai aplikasi khusus terkait bidang tugasnya. Disamping itu walaupun target telah terpenuhi, namun masih terdapat beberapa kendala dalam hal pengoperasian IT yang menyebabkan aplikasi tersebut belum maksimal digunakan. Kendala tersebut terutama terkait dengan SDM pelaksana di unit kerja, baik dari kualitas dan kuantitasnya. Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi tersebut maka kompetensi SDM di unit kerja dalam hal IT perlu ditingkatkan.

INDIKATOR 1.4

Persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM.

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
60%	73,36%	122,27%

IKU "Persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM" mengukur tingkat kepuasan Anggota DPR RI terhadap profesionalisme SDM, layanan kesehatan, layanan administrasi perjalanan dinas, dan layanan penyediaan sarana dan prasarana. Untuk menilai indikator ini digunakan survei kepuasan pengguna yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan minggu pertama bulan Januari 2017.

Survei kepada Anggota DPR RI ini dilakukan untuk mengetahui persepsi Anggota DPR RI terhadap kualitas dukungan Setjen dan BK DPR RI. Ini adalah survei yang pertama kali dilakukan untuk mengetahui *feed back* dari Anggota DPR RI sebagai pengguna layanan Setjen dan BK DPR RI. Bentuk layanan yang dinilai meliputi seluruh layanan yang diberikan oleh seluruh unit kerja yang ada di Setjen dan BK DPR RI yang berkaitan langsung kepada Anggota DPR RI, baik itu layanan teknis administrasi, persidangan, dan keahlian.



Instrumen survei yang digunakan adalah kuesioner yang menggunakan skala Likert. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna yang dikuantifikasi dalam satuan persentase, seperti yang disyaratkan dalam indikator kinerja.

Survei tersebut dilakukan dengan menggunakan sampling acak terhadap responden dari 10 Fraksi dengan jumlah populasi sebesar 560 Anggota DPR RI. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Krejcie dan Morgan dengan acuan derajat kepercayaan = 95%, *margin of error* = 7,8%, maka sampel yang diambil adalah sebesar 162 responden. Sampel diambil berdasarkan asas keacakan (*randomness*), artinya setiap elemen atau unsur dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Dengan demikian bias pemilihan dapat diperkecil sehingga mendapatkan sampel yang representatif. Adapun komposisi jumlah responden sebagaimana dalam tabel 11 berikut.

Tabel 11
Jumlah Responden

NO	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	SAMPEL
1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	109	30
2	Fraksi Partai Golkar	91	27
3	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	73	24
4	Fraksi Partai Demokrat	61	17
5	Fraksi Partai Amanat Nasional	48	14
6	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	47	12
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	40	13
8	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	39	9
9	Fraksi Partai Nasional Demokrat	36	10
10	Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat	16	6
	Total	560	162

Sumber: Hasil survey tahun 2016

Pengolahan data survei kinerja Setjen dan BK DPR RI dilakukan dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala likert (skala terendah 1 yaitu tidak puas dan skala tertinggi 5 yaitu sangat puas). Hasil survei dapat dilihat pada tabel 12 berikut.



Tabel 12
Indeks Kepuasan Pengguna Terhadap Kualitas Dukungan SDM

JENIS LAYANAN	SKOR KEPUASAN (SK. LIKERT) 1 - 5	RENTANG KRITERIA (%)
Profesionalitas SDM	3,82	76,44
Layanan Kesehatan	3,94	78,72
Layanan Administrasi Perjalanan Dinas	3,82	75,88
Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana	3,13	62,40
Indeks Kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM	3,71	73,36

Sumber: Hasil Survei Setjen dan BK DPR RI, 2017.

Adapun penjelasan terhadap tabel 12 sebagai berikut :

1. Profesionalitas SDM

Hasil survei kepuasan pengguna terhadap Profesionalitas SDM memperoleh skor kepuasan 3,82 skala likert. Apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil sebesar 76,44%. Penilaian Anggota DPR RI terhadap kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam penyediaan dukungan administrasi persidangan adalah baik atau memuaskan, dengan kualitas materi persidangan yang harus terus ditingkatkan. Selain itu, harapan Dewan terhadap inisiatif, komunikasi, dan kerja sama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan juga perlu ditingkatkan.

2. Layanan Kesehatan

Layanan Kesehatan memperoleh skor kepuasan tertinggi yaitu 3,94 skala likert. Apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil sebesar 78,72%. Layanan Kesehatan diberikan oleh Bagian Layanan Kesehatan. Unit ini tidak hanya melayani Anggota DPR RI akan tetapi juga pegawai baik tetap maupun kontrak. Tenaga medis dan non medis di Bagian tersebut dinilai memiliki keramahan, kecepatan, keterampilan, dan ketelitian dalam menangani pasien. Informasi yang diberikan kepada pasien juga dinilai jelas dan memadai, demikian halnya dengan sarana dan prasarana kesehatan yang ada dinilai baik atau memuaskan. Untuk terus mengoptimalkan



pelayanan perlu penambahan dokter spesialis, papan petunjuk, dan informasi pelayanan, disamping perluasan ruangan, agar layanan kesehatan lebih optimal lagi.

3. Layanan Administrasi Perjalanan Dinas

Layanan Administrasi Perjalanan Dinas memperoleh skor kepuasan 3,82 skala likert. Apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil sebesar 75,88%. Penilaian atas kecepatan dan ketelitian SDM dalam proses penanganan dokumen perjalanan dinas cukup memuaskan. Untuk meningkatkan kinerjanya, pelaksana layanan administrasi perjalanan dinas perlu menambah wawasan agar lebih menguasai materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan perjalanan. Selain itu perlu penyediaan ruang tunggu yang nyaman.

4. Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Hasil survei kepuasan pengguna terhadap Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana memperoleh skor kepuasan 3,13 skala likert. Apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil sebesar 62,40%. Skor kepuasan terhadap layanan penyediaan sarana dan prasarana adalah cukup memuaskan, dan merupakan skor yang terendah. Hal ini dikarenakan Anggota DPR RI menilai masih kurangnya kualitas dan kuantitas ruangan, sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kompleks DPR RI antara lain ruang kerja anggota yang sudah tidak layak dan tidak adanya ruang untuk Tenaga Ahli dan Staf Administrasi, sehingga sangat diperlukan gedung baru karena sudah *over capacity*. Begitu juga dengan sistem keamanan yang masih kurang memadai dalam menyaring pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk memasuki kompleks perkantoran DPR RI.

Secara keseluruhan hasil survei terhadap penilaian kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM Setjen dan BK DPR RI menunjukkan skor kepuasan 3,71 skala likert. Apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil sebesar 73,36%. Dapat dikatakan bahwa realisasi kinerja "Persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM" tercapai sebesar 73,36% atau memuaskan. Target kinerja adalah sebesar 60%, dengan demikian maka capaian kinerja adalah sebesar 123,67%.

LAPORAN KINERJA

2016



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

IKU Setjen yang diukur melalui skor kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM merupakan IKU yang baru digunakan dan diukur pada tahun 2016. Dengan demikian pencapaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.



SASARAN



2

Tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui dukungan pembentukan Undang-Undang yang berkualitas, pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang sesuai aspirasi masyarakat.

INDIKATOR 2.1

Dukungan substansi gugatan atas UU yang dimenangkan oleh DPR RI dan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah.

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
60%	90%	150%

Indikator Sasaran Program 2 adalah "Dukungan substansi gugatan atas UU yang dimenangkan oleh DPR RI dan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah". Indikator ini terdiri dari kegiatan pemberian dukungan substansi gugatan atas UU yang dimenangkan oleh DPR RI dan kegiatan dukungan substansi terhadap hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah.

a. Dukungan substansi gugatan atas UU yang dimenangkan oleh DPR RI

Dalam hal pemberian dukungan substansi atas gugatan perkara pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di MK kepada DPR RI, Setjen dan BK DPR RI memberikan dukungan penyiapan keterangan DPR RI, sebagaimana tabel 13 berikut.



Tabel 13

Dukungan BK DPR RI Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

No.	URAIAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016
	Perkara masuk	140 Perkara	111 Perkara
1.	Diputus	78 Perkara	41 Perkara
2.	Luncuran 2013 (diputus)	1 Perkara	-
3.	Luncuran 2014 (diputus)	79 Perkara	-
4.	Luncuran 2015 (diputus)	-	55 Perkara
	Jumlah	158 Perkara	96 Perkara

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang diputus sebanyak 41 perkara serta luncuran perkara tahun 2015 yang diputus sebanyak 55 perkara.

Tabel 14

Posisi Perkara gugatan UU di MK yang ditangani Oleh DPR RI

NO	URAIAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1.	Dikalahkan	23 perkara	19 perkara
2.	Dimenangkan	135 perkara	77 perkara
	JUMLAH	158 Perkara	96 Perkara

Dari angka yang tercantum di dalam tabel 14 di atas, diketahui jumlah perkara pengujian UU pada tahun 2016 adalah sebanyak 96 perkara, dan jumlah perkara yang dimenangkan oleh DPR RI adalah 77 perkara. Dengan demikian, maka persentase perkara yang dimenangkan oleh DPR RI adalah sebesar 80%.

Hal tersebut dapat terwujud atas dukungan substansi gugatan yang diberikan oleh BK DPR RI cq. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (pusat Panlak UU). Dengan demikian apabila dilihat dari kualitas suatu UU yang diuji materikan dapat



membuktikan, maka kualitas UU tersebut sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, yang berarti pula bahwa salah satu substansi gugatan yaitu dukungan penyiapan keterangan DPR RI yang dilakukan oleh BK DPR RI cukup optimal.

b. Dukungan substansi terhadap hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah

DPR RI melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan kebijakan Pemerintah sebagaimana diamanatkan di dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, untuk mengetahui tindak lanjut pemerintah dalam pelaksanaan UU dengan membentuk peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan dalam kegiatan rapat-rapat di Komisi (Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum), maupun kunjungan kerja ke daerah.

Adapun rapat-rapat dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada tahun 2016 disampaikan berikut tabel 15 berikut.

Tabel 15
Jumlah Rapat Komisi di Fungsi Pengawasan Tahun 2016

NO.	MASA SIDANG	KOMISI											JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	MS III	35	28	16	11	11	30	26	28	41	49	9	284
2	MS IV	5	4	10	10	10	18	9	19	16	15	3	119
3	MS V	21	8	3	6	16	28	7	12	29	31	3	164
4	MS I	23	12	34	8	23	22	10	11	34	31	7	215
5	MS II	12	9	17	11	10	7	7	3	7	17	5	105
JUMLAH RAPAT		96	61	80	46	70	105	59	73	127	143	27	887

Sumber: Rekapitulasi kegiatan persidangan tahun 2016 dari Komisi dan Paripurna

Merujuk Pasal 61 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib bahwa Hasil kegiatan rapat-rapat berupa laporan singkat rapat dapat menjadi rekomendasi bagi mitra kerja Komisi dalam menjalankan pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah, maka dapat disampaikan bahwa fungsi pengawasan menghasilkan rekomendasi hasil pengawasan dalam 887 rapat fungsi pengawasan. Dukungan substansi atas fungsi pengawasan ini

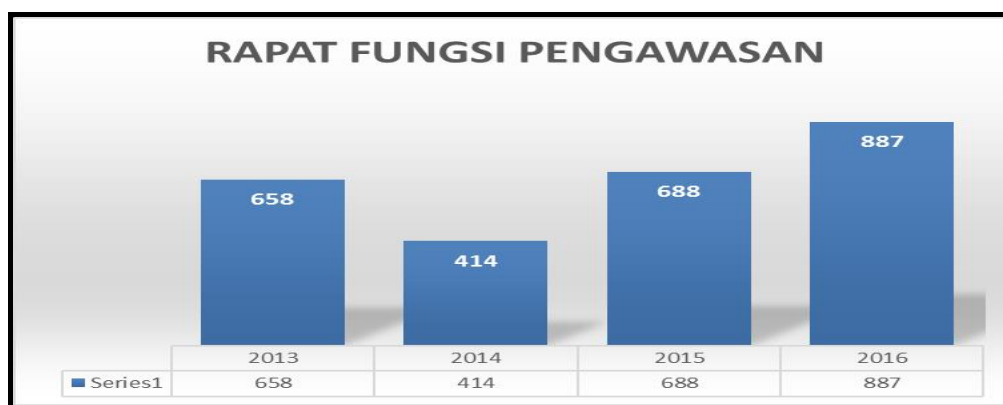


disiapkan oleh Setjen dan BK DPR RI sejumlah 887 substansi pengawasan.

Selain dukungan penyiapan substansi pengawasan pada rapat-rapat fungsi pengawasan DPR RI, kegiatan pengawasan juga ditindaklanjuti dengan kegiatan kunjungan kerja DPR RI.

Apabila dibandingkan jumlah rapat-rapat Komisi di fungsi pengawasan pada tahun sebelumnya sebagaimana gambar 7 berikut:

Gambar 7
Perbandingan Rapat Fungsi Pengawasan
Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016



Sumber: Rekapitulasi kegiatan persidangan tahun 2016 dari Komisi

Maka terlihat bahwa rapat-rapat pada fungsi pengawasan mengalami peningkatan tiap tahun, kecuali pada tahun 2014. Hal ini berarti bahwa dukungan substansi yang diberikan BK DPR RI dalam fungsi pengawasan mengalami peningkatan.

Dari kedua kegiatan fungsi pengawasan yang disampaikan di atas dapat disampaikan bahwa persentase kinerja dari Indikator "Dukungan substansi gugatan atas UU yang dimenangkan oleh DPR RI dan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah" didapat dari pembagian 2 (dua) angka capaian kinerja: (1) substansi gugatan atas UU yang dimenangkan oleh DPR RI sebesar 80%; dan (2) hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah sebesar 100%. Hasil realisasinya adalah sebesar 90%. Angka



tersebut jika dibandingkan dengan target awal sebesar 60%, maka dengan demikian capaian kinerja adalah sebesar 150%.

Dalam hal penghitungan capaian kinerja, penetapan target di awal tahun terlalu rendah, yaitu sebesar 60%. Oleh karena itu penetapan target ke depan perlu ditingkatkan.

IKU 2.1 merupakan IKU yang baru digunakan dan diukur pada tahun 2016. Dengan demikian pencapaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.



SASARAN



3

Terwujudnya dukungan kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat

Sasaran ke-3 “Terwujudnya dukungan kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat” ini diharapkan akan dapat mendukung menjadikan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang aspiratif dan representatif. Adapun IKU didalam mencapai sasaran ketiga yaitu:

- Dukungan peningkatan komunikasi antara Anggota DPR RI dengan konstituennya
- Terlaksananya diplomasi parlemen.

INDIKATOR 3.1

Dukungan peningkatan komunikasi antara Anggota DPR RI dengan konstituennya dan terlaksananya diplomasi parlemen.

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
80%	111%	138,75%

Berikut adalah realisasi IKU sasaran ke-3 yang diperoleh dengan menghitung rata-rata dari jumlah realisasi sub indikator sebagaimana digambarkan dalam tabel 16 berikut.



Tabel 16
Realisasi Dukungan Peningkatan Komunikasi Antara Anggota DPR RI
Dengan Konstituennya Dan Terlaksananya Diplomasi Parlemen
Tahun 2016

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Dukungan Peningkatan Komunikasi antara Anggota DPR RI dengan konstituennya (Dukungan teknis administrasi dan anggaran terlaksananya kegiatan kunjungan daerah pemilihan DPR RI)	77 dapil	77 Dapil	100%
2.	Terlaksananya Diplomasi Parlemen Dukungan teknis administrasi, keahlian, dan anggaran terlaksananya diplomasi parlemen	50 kegiatan	61 kegiatan	122%
Rata-rata capaian realisasi		111%		

a. Dukungan Peningkatan Komunikasi antara Anggota DPR RI dengan konstituennya

Tercapainya dukungan peningkatan komunikasi antara Anggota DPR RI dengan konstituennya tidak terlepas dari dukungan Setjen dan BK DPR RI dalam tata kelola administrasi perjalanan dinas Anggota DPR RI. Mengingat banyaknya jenis kunjungan yang dilakukan oleh DPR RI, Setjen dan BK DPR RI melakukan upaya agar tidak terjadi bentrokan kegiatan pada tanggal yang sama dengan mengatur dalam matriks kunjungan untuk setiap Anggota Dewan, sehingga dapat dipastikan bahwa kunjungan yang dilakukan tidak mengalami *over lapping* dalam pelaksanaan maupun administrasinya.

Disamping itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan memberikan konsep pengaturan jadwal kunjungan dapil kepada DPR RI dan diakomodir oleh DPR RI dalam bentuk Jadwal Masa Persidangan yang terdiri dari jadwal sidang dan jadwal reses.

Dalam rangka akuntabilitas kunjungan dapil DPR RI, maka Setjen dan BK DPR RI mengeluarkan surat permintaan kepada Tenaga Ahli Anggota DPR RI untuk membuat laporan atas kunjungan dapil yang dilakukan



Dukungan Setjen dan BK di bidang teknis dan administratif terkait kunjungan dapil sebagaimana diuraikan di atas telah terealisasi sesuai target, 77 Dapil, dengan capaian 100%.

Selain kunjungan dapil, dukungan lain yang dilakukan Setjen dan BK DPR RI di bidang peningkatan komunikasi antara Anggota DPR RI dengan konstituennya adalah pembentukan rumah aspirasi dalam fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Rumah aspirasi ditujukan untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Anggota DPR.

Keberhasilan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- a. tersedianya dukungan anggaran yang memadai;
- b. tersedianya aplikasi teknis perjalanan dinas sehingga mempercepat proses layanan administrasi perjalanan dinas; dan
- c. tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerjasama yang baik dalam mencapai target kinerja.

b. Dukungan terlaksananya diplomasi parlemen

Diplomasi Parlemen yang dilakukan oleh DPR RI merupakan salah satu cara memperjuangkan kepentingan nasional yang dilakukan oleh DPR RI sebagai representasi rakyat di forum internasional. Diplomasi Parlemen dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam bentuk kegiatan:

- 1) kerjasama bilateral merupakan diplomasi parlemen yang dilakukan dalam bentuk tukar menukar pengiriman kunjungan delegasi muhibah DPR RI dengan negara sahabat dan Kunjungan GKSB DPR RI kenegara sahabat yang dikoordinasikan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI.
- 2) kerjasama regional merupakan diplomasi parlemen yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antar parlemen dengan menghadiri konferensi di tingkat regional yang melibatkan DPR RI sebagai anggota dari *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)* dan *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* dalam sidang AIPA, Sidang APA dan Sidang APPF, dan sidang regional lainnya (*Asian Parliamentarians Conference on Environment and*



Development, Forum of Asia Pacific Parliamentarian on Education, dll).

- 3) kerjasama internasional merupakan diplomasi parlemen yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antar parlemen dengan menghadiri konferensi di tingkat internasional yang melibatkan DPR RI sebagai anggota dari *Inter Parliamentary Union (IPU)* dan *Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)*, Sidang-sidang terkait Badan-badan di bawah PBB (UNHCR, UNICEF, dll), dan Sidang organisasi lainnya.

Pada tahun 2016, Setjen dan BK DPR RI memberikan dukungan terhadap terlaksananya diplomasi parlemen sebanyak 61 kegiatan dukungan dari 50 kegiatan dukungan yang direncanakan. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk penyiapan dokumen diplomasi parlemen, antara lain penyiapan itinerary delegasi, agenda delegasi, draft SK Pimpinan, intervensi delegasi, buku *country profile*, buku saku delegasi, press release Sidang, draft MOU, Konsep Draft Resolusi, Konsep pidato, dan draft Laporan Delegasi. Selain itu, Setjen dan BK DPR RI juga melakukan dukungan melalui kegiatan komunikasi, koordinasi dan pendampingan selama kegiatan diplomasi parlemen dilaksanakan. Data dukungan kegiatan diplomasi parlemen yang telah dilakukan oleh Setjen dan BK DPR RI tahun 2016 per bidang kerjasama, per masa sidang sebagaimana tabel 17, tabel 18, dan tabel 19 berikut.

Tabel 17

Dukungan Kegiatan Diplomasi Parlemen Dalam Kerjasama Bilateral

OUTPUT	M.S. III	M.S. IV	M.S. V	M.S. I	M.S. II
Itinerary Delegasi	6	2	7	2	4
Agenda Delegasi	6	2	7	2	4
Draft SK Pimpinan	6	2	7	2	4
Draft MoU	6	2	7	2	4
Buku Country Profile	6	2	7	2	4
Buku Saku Delegasi	6	2	7	2	4
Press release Kegiatan	6	2	7	2	4
Draft Laporan Delegasi	6	2	7	2	4
Dokumen Administrasi perjalanan	6	2	7	2	4
Jumlah delegasi yang harus didukung	21				



Dari tabel 17 dapat disampaikan bahwa dukungan Setjen dan BK DPR RI dalam penyelenggaraan kegiatan diplomasi parlemen melalui kerjasama bilateral pada tahun 2016 dilakukan terhadap 21 delegasi DPR RI. Dalam rangka meningkatkan diplomasi parlemen dalam kerjasama bilateral, selain melakukan dukungan dalam kegiatan pengiriman delegasi, Setjen dan BK DPR RI juga melakukan dukungan terhadap kegiatan penerimaan tamu (*friendly talk*) dengan parlemen negara sahabat serta *courtesy call* dengan Duta Besar negara sahabat. Pada tahun 2016 telah dilakukan *Courtesy Call* baik yang dilakukan oleh Pimpinan DPR RI, Group Kerjasama Bilateral DPR RI maupun *friendly talk* yang dilakukan oleh Pimpinan BKSAP dengan stakeholder terkait.

Secara keseluruhan dukungan teknis administrasi dan persidangan yang telah dilakukan oleh Setjen DPR RI pada kegiatan diplomasi parlemen melalui kegiatan pengiriman delegasi dan *Courtesy call* sebesar 21 dukungan substansi.

Dukungan Setjen dan BK DPR RI dalam penyelenggaraan kegiatan diplomasi parlemen melalui kerjasama regional adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Dukungan Kegiatan Diplomasi Parlemen
Dalam Kerjasama Regional

DUKUNGAN	M.S. III	M.S. IV	M.S. V	M.S. I	M.S. II
Itinerary Delegasi	1	3	2	6	1
Agenda Delegasi	1	3	2	6	1
Draft Intervensi Delegasi	1	3	2	6	1
Draft SK Pimpinan	1	3	2	6	1
Draft resolusi	1	3	2	6	1
Buku Posisi Delegasi	1	3	2	6	1
Leaflet Delegasi	1	3	2	6	1
Buku Saku Delegasi	1	3	2	6	1
Press release Sidang	1	3	2	6	1
Draft Laporan Delegasi	1	3	2	6	1
Dokumen Administrasi perjalanan	1	3	2	6	1
Jumlah delegasi yang harus didukung	13				



Dari tabel 18 dapat disampaikan bahwa dukungan Setjen dan BK DPR RI dalam penyelenggaraan kegiatan diplomasi parlemen melalui kerjasama regional pada tahun 2016 dilakukan terhadap 13 delegasi DPR RI.

Dukungan teknis, administratif dan substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen dalam kerjasama Internasional yang diberikan Setjen dan BK DPR RI melalui pengiriman 27 delegasi ke berbagai sidang parlemen dalam lingkup internasional, sebagaimana dalam table 19 berikut.

Tabel 19
Dukungan Kegiatan Diplomasi Parlemen
Dalam Kerjasama Internasional

OUTPUT	M.S. III	M.S. IV	M.S. V	M.S. I	M.S. II
Itinerary Delegasi	5	3	6	7	6
Agenda Delegasi	5	3	6	7	6
Draft Intervensi Delegasi	5	3	6	7	6
Draft SK Pimpinan	5	3	6	7	6
Draft resolusi	5	3	6	7	6
Buku Posisi Delegasi	5	3	6	7	6
Leaflet Delegasi	5	3	6	7	6
Buku Saku Delegasi	5	3	6	7	6
Draft Press release Sidang	5	3	6	7	6
Draft Laporan Delegasi	5	3	6	7	6
Dokumen Administrasi perjalanan	5	3	6	7	6
Jumlah delegasi yang harus didukung	27				

Dari tabel 19 dapat disampaikan bahwa dukungan Setjen dan BK DPR RI dalam penyelenggaraan kegiatan diplomasi parlemen melalui kerjasama internasional pada tahun 2016 dilakukan terhadap 27 delegasi DPR RI.

Secara keseluruhan dalam kegiatan dukungan terhadap pelaksanaan diplomasi parlemen melalui kerjasama bilateral, regional, dan internasional pada tahun 2016 tercapai 61 kegiatan dukungan dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 50 kegiatan dukungan. Dengan demikian maka capaian kinerja adalah melebihi target atau sebesar 122%.



Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu dari 49 kegiatan yang direncanakan terealisasi 33 kegiatan, atau capaian kinerja sebesar 82%, pada tahun 2016 terjadi peningkatan capaian kinerja. Dari target 50 kegiatan terealisasi 61 kegiatan sehingga capaian kinerja sebesar 122% sebagaimana dalam tabel 20.

Tabel 20

Perbandingan Target Dukungan Keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional Dalam Rangka Diplomasi Parlemen

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	49 kegiatan	33 kegiatan	67%
2016	50 kegiatan	61 kegiatan	122%

Dari Indikator sasaran 3 "Dukungan peningkatan komunikasi antara Anggota DPR RI dengan konstituennya dan terlaksananya diplomasi parlemen", maka dapat disampaikan bahwa realisasi kedua kegiatan diperoleh angka 111%. Dengan demikian, maka dengan target kinerja IKU ini ditetapkan sebesar 80% dan realisasi sebesar 111%, maka capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 138,75%. Capaian melebihi target tersebut karena jumlah pelaksanaan kegiatan komunikasi antara Anggota DPR RI dengan konstituennya dan terlaksananya diplomasi parlemen merupakan kegiatan yang linear terhadap kegiatan dukungan substansi yang harus disiapkan oleh Setjen DPR RI.

Diharapkan kedepan Setjen dan BK DPR RI dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, perbaikan tata laksana dengan penyusunan SOP kegiatan terkait, dan lain sebagainya, dalam memberikan dukungan penyelenggaraan diplomasi parlemen. Hal lain yang perlu dibuat adalah Penetapan Standar Pelayanan atas kegiatan pengiriman delegasi DPR RI ke LN (bilateral, regional, internasional), dan penerimaan parlemen negara sahabat.

Mengingat pengiriman delegasi dalam rangka diplomasi parlemen memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Negara-negara sahabat, maka diperlukan kerjasama yang lebih erat misalnya dalam bentuk MoU untuk mendapatkan substansi diplomasi parlemen yang diperlukan delegasi.



SASARAN



4

Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal

INDIKATOR 4.1

Persentase tersedianya Naskah Akademik, draft RUU, keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di Mahkamah Konstitusi yang digunakan oleh DPR RI.

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
100%	85,5%	85.5%

Indikator "Persentase tersedianya Naskah Akademik (NA), draft Rancangan Undang-Undang (draft RUU), keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di MK yang digunakan oleh DPR RI" diukur melalui kegiatan:

- Penyiapan Naskah Akademik, draft RUU, dan
- Penyiapan keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di MK, yang digunakan oleh DPR RI.

Dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dalam penyiapan NA dan draft RUU dilaksanakan oleh BK DPR RI cq Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) berdasarkan permintaan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait, dan mengacu pada daftar prolegnas RUU prioritas Tahun 2016 usul DPR RI.

Tahun 2016 Pusat PUU menetapkan target 24 dokumen NA dan draft RUU pada perjanjian kinerjanya. Dari target tersebut terealisasi sejumlah 17 NA dan draft RUU, dan seluruhnya digunakan oleh DPR RI

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

dalam pembahasan RUU. Dengan demikian capaian kinerja adalah sebesar 71%, sebagaimana tergambar dalam tabel 21 berikut.

Tabel 21

Tabel Capaian Naskah Akademik dan Draft RUU Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	Persentase tersedianya Naskah Akademik dan draft RUU	24	17	71 %

Dalam hal mendukung substansi *judicial review* terhadap UU di MK, BK DPR RI cq Pusat Pemantauan Pelaksanaan undang-undang (Pusat Panlak) memberikan dukungan penyusunan konsep keterangan DPR. Pada tahun 2016, target penyiapan keterangan DPR RI atas gugatan UU di MK sejumlah 111 keterangan DPR RI. Dari target tersebut telah terealisasi sebesar 111 keterangan DPR. Sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100 % sebagaimana tabel 22 berikut.

Tabel 22

Tabel Capaian kinerja Penyiapan Keterangan DPR RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	Persentase tersedianya keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di Mahkamah Konstitusi yang digunakan oleh DPR RI.	111	111	100%

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Indikator kinerja 'Persentase tersedianya Naskah Akademik, draft RUU, keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di MK yang digunakan oleh DPR RI' diperoleh dengan membagi angka capaian kinerja: (1) persentase tersedianya NA dan draft RUU yang digunakan DPR RI sebesar 71 %; dan (2) persentase keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di MK yang digunakan DPR RI sebesar 100 %. Hasil realisasinya adalah sebesar 85,5%. Angka tersebut jika dibandingkan dengan target awal sebesar 100 %, maka capaian kinerja adalah sebesar 85,5 % sebagaimana tabel 23 berikut.

Tabel 23
Capaian Kinerja tersedianya NA dan Draft RUU serta keterangan DPR RI Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	Persentase tersedianya Naskah Akademik dan draft RUU	24	17	71 %
	Persentase tersedianya keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di Mahkamah Konstitusi yang digunakan oleh DPR RI.	111	111	100%
JUMLAH CAPAIAN				85,5%

Realisasi dukungan penyusunan konsep NA dan draft RUU pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Pusat PUU tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 24 konsep NA dan draft RUU karena ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan penyusunan NA dan draft RUU antara lain adalah kuantitas SDM yang belum mencukupi, target waktu penyelesaian pekerjaan yang terbatas, terjadinya perubahan penetapan prolegnas RUU prioritas Tahun 2016, dan komunikasi yang belum efektif antara DPR RI dengan Setjen dan BK DPR RI.



Hasil ini perlu ditingkatkan baik dari aspek kualitas sebagaimana pemenuhan standar penyusunan Naskah akademik sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

INDIKATOR 4.2

Indeks kepuasan pengguna layanan.

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
60%	72,65%	121,08%

Sasaran program dari indikator kinerja 4.2 adalah “Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal”. Indikator ini mengukur kepuasan pengguna layanan terhadap layanan keahlian yang diberikan oleh BK DPR RI.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Keahlian DPR RI ini diperoleh melalui survei terhadap Anggota DPR RI yang merupakan satu kesatuan dengan survei kepuasan dukungan SDM Setjen dan BK DPR RI. Pemilihan responden dan analisis survei menggunakan metode yang sama.

Kepuasan pengguna terhadap Layanan Badan Keahlian DPR RI dinilai berdasarkan produk dan dukungan layanan keahlian yang diberikan kepada Anggota DPR RI melalui penilaian terhadap aspek-aspek: kemudahan mendapatkan produk, kemudahan mendapatkan layanan, kualitas produk, kesesuaian produk dengan kebutuhan, kesesuaian layanan dengan kebutuhan, dan kualitas SDM dukungan keahlian.

Pengolahan data Survei Kinerja Setjen dan BK DPR RI dilakukan dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala likert (skala terendah 1 yaitu tidak puas dan skala tertinggi 5 yaitu sangat puas). Secara keseluruhan hasil survei terhadap kepuasan pengguna layanan Badan Keahlian DPR RI menunjukkan skor kepuasan 3,64 skala likert. Apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil sebesar 72,65%. Indeks kepuasan pengguna layanan BK DPR RI sebagaimana tabel 24 berikut.



Tabel 24
Indeks kepuasan pengguna layanan Badan Keahlian DPR RI

JENIS LAYANAN	SKOR KEPUASAN (SKALA LIKERT)	RENTANG KRITERIA
	1 – 5	(%)
Kemudahan mendapatkan produk	3,65	72,96
Kemudahan mendapatkan layanan	3,60	71,60
Kualitas Produk	3,68	73,09
Kesesuaian produk dengan kebutuhan	3,60	71,98
Kesesuaian layanan dengan kebutuhan	3,70	73,83
Kualitas SDM	3,62	72,47
Indeks kepuasan rata-rata pengguna layanan Badan Keahlian DPR RI	3,64	72,65

Sumber: Hasil Survei Setjen dan BK DPR RI, 2017

Dari tabel 24 di atas dapat disampaikan bahwa tingkat kepuasan Anggota DPR RI terhadap layanan keahlian yang diberikan oleh BK DPR RI adalah sebesar 72,65%. Target yang ditetapkan adalah sebesar 60%, sehingga capaian kinerja IKU "Indeks Kepuasan Pengguna Layanan" adalah sebesar 121,08%.

Skor tertinggi ada pada jenis layanan Kesesuaian Layanan dengan Kebutuhan yaitu 3,70 skala likert. Apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil sebesar 73,83%. Kesesuaian layanan dengan kebutuhan yang dimaksud disini adalah layanan pendampingan Penyusunan/pembahasan RUU; Pendampingan Tim DPR RI; Pendampingan Khusus Non RUU; Pendampingan Tim Kuasa

LAPORAN KINERJA

2016



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Hukum DPR RI di MK; Pendampingan Pembahasan Anggaran; dan Dukungan Keahlian lainnya yang bersifat insidental.

Skor selanjutnya diikuti oleh Kualitas Produk. Kualitas Produk memperoleh skor kepuasan 3,68 skala likert. Apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil sebesar 73,09%. Adapun produk yang dihasilkan oleh BK DPR RI adalah NA dan draf RUU; Info Singkat; buletin APBN; buletin Ilmiah; analisis dan Referensi APBN; analisis dan Referensi LHP BPK; keterangan DPR terkait uji formil dan materiil UU di MK; hasil pemantauan Pelaksanaan UU; buku-buku terbitan BK DPR RI; pointers, makalah, sambutan, dan pidato.

Kedepan untuk peningkatan kualitas layanan keahlian perlu peningkatan beberapa aspek dominan yang menjadi perhatian Anggota DPR RI diantaranya tersedianya data SDM sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh BK DPR RI, sehingga apabila dibutuhkan oleh Anggota DPR RI, BK DPR RI dapat segera memenuhinya. Selain itu pendampingan oleh tenaga ahli yang kompeten dalam setiap kegiatan kedewanan masih dirasa kurang memadai karena kurangnya jumlah SDM.



SASARAN



5

Dokumen Pertimbangan Hukum dan Litigasi DPR RI

INDIKATOR 5.1

Jumlah keterangan DPR dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
50 perkara	52 perkara	104%

IKU “Jumlah keterangan DPR dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK)” diukur melalui pemberian dukungan penanganan perkara permohonan pengujian formal dan materiil UU terhadap UUD Tahun 1945 di MK.

Setjen dan BK DPR RI memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam proses litigasi di MK berupa penyusunan Keterangan DPR RI untuk disampaikan oleh DPR RI cq Tim Kuasa DPR RI (Pimpinan dan/atau Anggota AKD yang melakukan pembentukan UU yang diuji materiil dengan didampingi oleh Anggota Komisi III) dalam proses persidangan perkara pengujian UU di MK. Selain itu, Setjen dan BK DPR RI juga mendampingi Tim Kuasa DPR RI yang diwakili oleh pejabat/pegawai dari Pusat Panlak UU dalam persidangan di MK dengan menyiapkan kelengkapan administrasi persidangan serta data dan informasi terkait dengan bahan-bahan pokok perkara pengujian UU.

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Pada Tahun 2016, Setjen dan BK DPR RI, cq Pusat Panlak UU telah melaksanakan dukungan administrasi dan keahlian dalam proses litigasi di MK berupa penanganan 52 perkara permohonan Pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 dengan menyusun 52 Keterangan DPR dalam penanganan perkara di MK. Realisasi sebesar 52 keterangan DPR RI tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu 50 keterangan DPR RI. Yang berarti bahwa capaian kerjanya sebesar 104%.

Terjadi sedikit peningkatan jumlah penanganan perkara di MK pada tahun 2016, yang sebelumnya berjumlah 50 perkara di tahun 2015, pada tahun ini menjadi sebanyak 52 perkara. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya permohonan pengujian UU yang diajukan oleh masyarakat maupun perorangan, dan badan hukum ke MK sebagaimana tabel 25 berikut:

Tabel 25
Data Perbandingan Dukungan Setjen dan BK DPR RI dalam Litigasi Perkara di Mahkamah Konstitusi tahun 2016

2015		2016	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
45 perkara	50 perkara	50 perkara	52 perkara

Disamping memberikan dukungan keahlian terhadap penanganan litigasi di MK, Setjen dan BK DPR RI juga memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap penanganan perkara gugatan perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Umum yang dilakukan oleh Tim Kuasa DPR RI/Tim Kuasa Substitusi yaitu pejabat dan/atau pegawai Setjen dan BK DPR RI yang tugas dan fungsinya membidangi urusan hukum.

Pada Tahun 2016, target penanganan perkara yang dilakukan oleh Tim Kuasa DPR RI/Tim Kuasa Substitusi adalah 6 perkara baik penanganan perkara Perdata maupun penanganan perkara Tata Usaha Negara. Realisasi pada Tahun 2016 melebihi target yang sudah direncanakan yaitu sebesar 6 penanganan perkara dengan realisasi berjumlah 10 penanganan perkara dengan rincian yaitu 8 perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta, 1 perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kraksaan dan 1 perkara gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.



Harus diakui dalam penetapan indikator Sasaran 5 kurang tepat mengingat pada Sasaran 5 yaitu dokumen pertimbangan hukum dan litigasi DPR RI seharusnya memiliki 2 indikator yang mencerminkan kegiatan dukungan litigasi di MK, dan litigasi di Peradilan Umum, dan kegiatan non litigasi berupa pemberian pertimbangan hukum.

Walaupun telah melebihi target, Setjen dan BK DPR RI menghadapi kendala dalam melaksanakan dukungan kegiatan penanganan perkara di MK, yaitu kesulitan dalam mengumpulkan bahan penyusunan keterangan DPR. Kedepan perlu tata kelola dokumentasi rapat, dan hasil pembahasan UU yang lebih baik lagi.

Dalam pencapaian Sasaran 1 sampai 5 melalui 9 IKU di atas, Setjen dan BK DPR RI sangat terbantu dengan adanya peningkatan level unit pengawasan yang berada pada level Eselon 1, sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Perpres 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, sehingga Sistem AKIP dapat dijalankan dalam menjaga koridor perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel sesuai dengan salah satu misi Setjen dan BK DPR RI.

Meskipun penguatan pengawasan intern bukan merupakan IKU Setjen dan BK DPR RI, namun sangat menentukan dalam pencapaian kinerja tahun 2016 sebagaimana capaian kinerja pengawasan intern melalui IKU Inspektorat Utama "Persentase Rekomendasi hasil pengawasan intern yang ditindaklanjuti" sebesar 76,47%.

Sebagai organisasi yang baru terbentuk, capaian tersebut sudah cukup memadai, dan dapat mendukung peningkatan pencapaian target kinerja Setjen dan BK DPR RI melalui kegiatan :

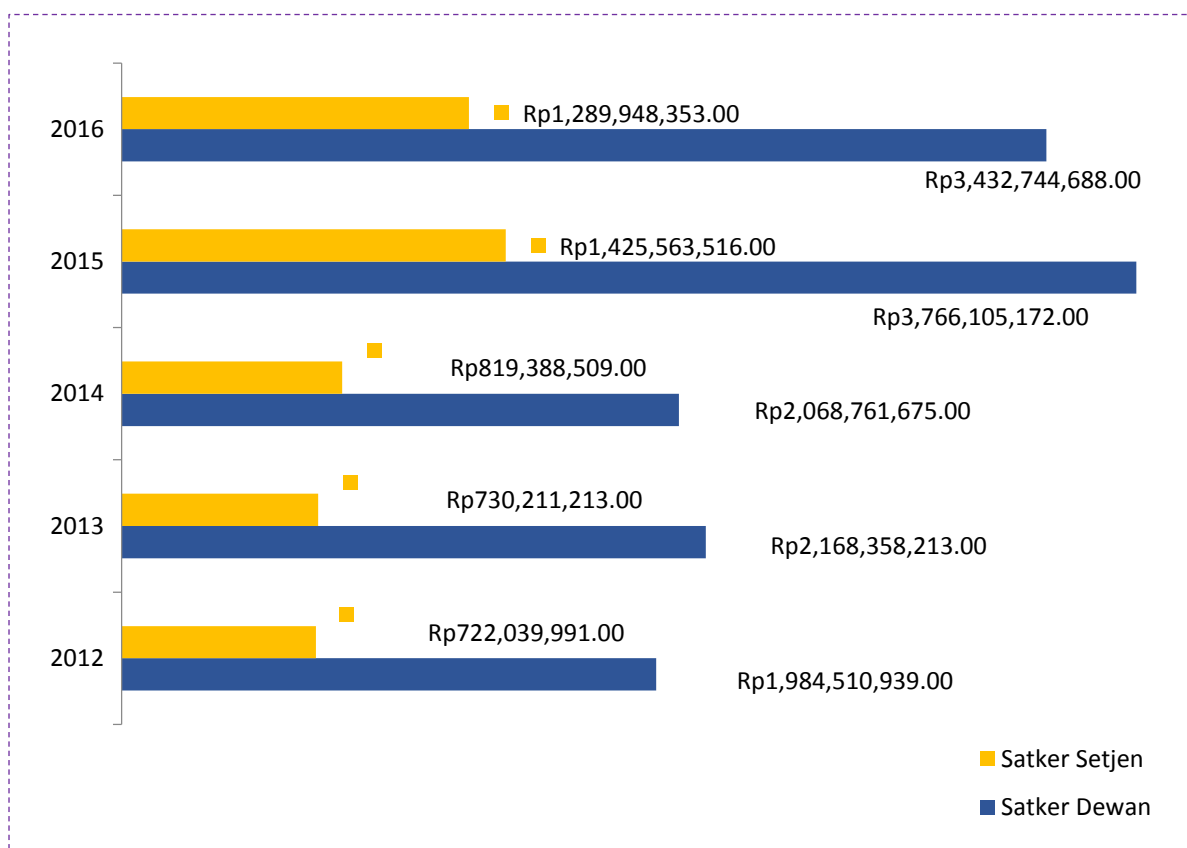
1. Menetapkan tahun 2016 sebagai tahun penyusunan regulasi di bidang Pengawasan;
2. Peningkatan level APIP melalui Internal Audit Capability Model (IACM);
3. Mengawal pencapaian level maturitas SPIP Setjen dan BK DPR RI.



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang dikelola oleh Setjen dan BK DPR RI meliputi Satker Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Satker Dewan. Berikut merupakan gambaran persandingan anggaran yang dikelola Setjen DPR RI Tahun 2012—2016 sebagaimana terdapat dalam gambar 8 berikut.

Gambar 8
Perbandingan Anggaran yang dikelola Sekretariat Jenderal DPR RI
Tahun 2012 – 2016 (dalam ribuan)



Untuk Satker Dewan, anggaran yang tersedia digunakan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan oleh DPR RI melalui pengelolaan sekretariat AKD DPR RI, selain itu juga berupa hak keuangan dan administrasi DPR, serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR. Sedangkan untuk Satker Setjen meliputi 2 program yaitu

LAPORAN KINERJA

2016



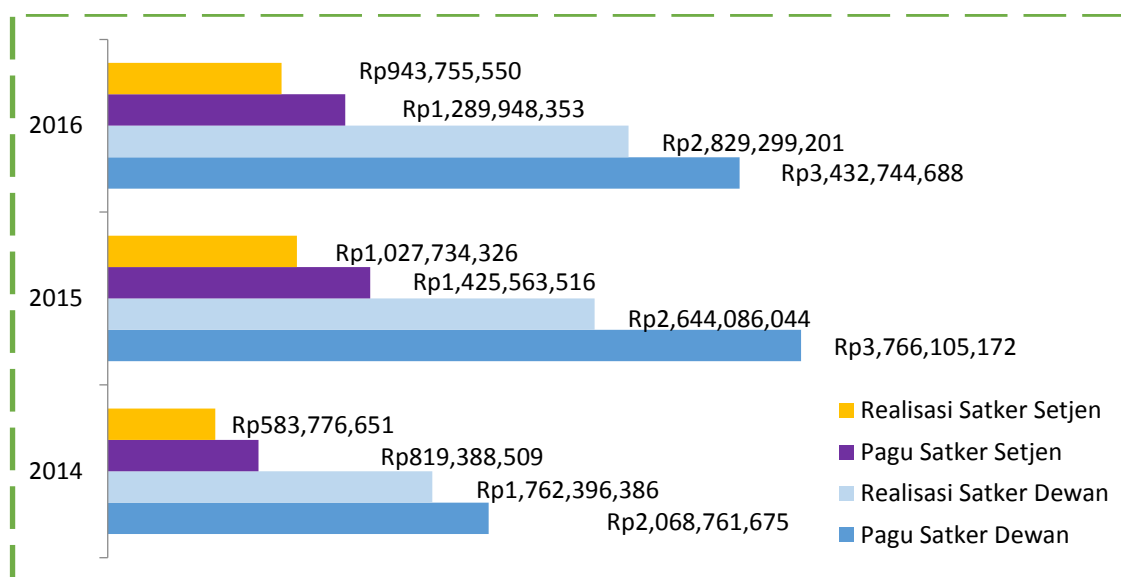
**SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI, dan Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 dan tahun 2015, perbandingan tingkat realisasi anggaran tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 9

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Dewan dan Satker Setjen Tahun 2014, Tahun 2015, dan Tahun 2016 (dalam ribuan)



Gambaran anggaran yang dikelola oleh Setjen dan BK DPR RI pada masing-masing unit kerja sebagaimana tabel 26 berikut.

Tabel 26
Realisasi Anggaran Setjen dan BK DPR RI Per Biro/Pusat

NO.	UNIT KERJA	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN TERKAIT PENCAPAIAN IKU
1.	Biro Persidangan I	624.257.184.000	333.184.947.148	53%	Mendukung Sasaran 1 IKU 1.1

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

NO.	UNIT KERJA	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN TERKAIT PENCAPAIAN IKU
2.	Biro Persidangan II	146.628.511.000	84.475.704.700	58%	Mendukung Sasaran 1 IKU 1.1
3.	Biro KSAP	153.249.428.000	101.914.724.007	67%	Mendukung Sasaran 3
4.	Biro Setpim	112.040.422.000	54.897.188.238	49%	Mendukung Sasaran 1 IKU 1.1
5.	Biro Pemberitaan Parlemen	193.702.549.000	157.811.401.740	81%	Mendukung Sasaran 1 IKU 1.2
6.	Biro Protokol	16.607.158.000	6.420.857.706	39%	Mendukung Sasaran 1 IKU 1.2
7.	Biro Hukum dan Duanmas	2.543.844.000	1.887.672.200	74%	Mendukung Sasaran 5
8.	Biro Kepeg dan Organisasi	39.117.321.000	29.638.581.099	76%	Mendukung Sasaran 1 IKU 1.4
9.	Biro Renkeu	2.685.369.788.000	2.495.784.839.929	93%	Mendukung Sasaran 3
10.	Biro Pengelolaan BMN	474.594.166.000	290.275.843.382	61%	Mendukung Sasaran 1 IKU 1.4
11.	Biro Umum	183.288.289.000	150.865.164.966	82%	Mendukung Sasaran 1 IKU 1.4
12.	Inspektorat I	2.557.104.000	1.426.774.600	56%	
13.	Inspektorat II	2.680.207.000	2.193.909.700	82%	
14.	Pusdiklat	9.365.718.000	6.413.123.490	68%	
15.	Pusdatin	31.703.346.000	24.864.021.647	78%	

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

NO.	UNIT KERJA	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN TERKAIT PENCAPAIAN IKU
16.	Pusat Perancangan UU	11.771.508.000	7.933.466.950	67%	Mendukung Sasaran 4 IKU 4.1, dan IKU 4.2
17.	Pusat Panlak UU	10.870.005.000	7.744.449.150	71%	Mendukung Sasaran 2, Sasaran 4 IKU 4.1, dan Sasaran 5
18.	Pusat Kajian Anggaran	3.980.111.000	3.626.840.400	91%	Mendukung Sasaran 4 IKU 4.2
19.	Pusat Kajian AKN	3.120.450.000	1.814.563.820	58%	Mendukung Sasaran 4 IKU 4.2
20.	Pusat Penelitian	15.245.932.000	9.880.675.770	65%	Mendukung Sasaran 4 IKU 4.2

Pada Tahun 2016 DPR RI mendapatkan anggaran DIPA sebesar Rp. Rp 5.223.295.696.000. Dengan rincian untuk Satker Setjen sebesar Rp. 1.790.551.008.000 dan untuk Satker Dewan sebesar Rp. 3.432.744.688.000. Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat, dilaksanakan penghematan anggaran negara, termasuk pada Setjen dan BK DPR RI. Dengan adanya penghematan ini, mengakibatkan adanya pengurangan anggaran pada Satker Setjen sebesar Rp. 500.602.655.000, sehingga anggaran pada Satker Setjen menjadi sebesar Rp. 1.289.948.353.000, sedangkan anggaran pada Satker Dewan tidak mengalami perubahan. Dengan adanya penghematan ini, terjadi perubahan besaran anggaran DPR RI menjadi sebesar Rp. 4.722.693.041.000. Sampai dengan akhir tahun 2016, total realisasi anggaran DPR RI sebesar Rp. 3.773.054.750.642 dengan persentase realisasi anggaran adalah sebesar 79,89%. Realisasi tersebut lebih tinggi 9,16% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran DPR RI tahun 2015 yang mencapai persentase sebesar 70,73%.

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Kinerja penyerapan anggaran sangat tergantung kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan, salah satunya adalah adanya moratorium kunjungan luar negeri Dewan di fungsi legislasi dan pembatasan kunjungan luar negeri Dewan di fungsi pengawasan. Selain itu, penyerapan anggaran untuk program pembentukan rumah aspirasi tidak dapat direalisasikan karena aturan teknis pelaksanaannya belum disepakati. Kebijakan lainnya yang mengakibatkan rendahnya kinerja anggaran adalah tidak terlaksananya rencana pembangunan gedung baru DPR RI.

Berikut gambaran pengelolaan anggaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 27
Realisasi Anggaran Setjen dan BK DPR RI per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja Program (IKP/IKU)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal	Persentase materi persidangan yang digunakan oleh DPR RI	7.854.102.000	4.163.936.000
		Persentase penyelenggaraan upacara kenegaraan yang sesuai dengan SOP	2.676.234.000	1.416.895.800
		Persentase unit kerja yang menerapkan tata kelola berbasis IT	16.607.158.000	6.420.857.706
		Persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM	31.703.346.000	24.864.021.647
2.	Tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui dukungan pembentukan UU yang berkualitas, pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang sesuai aspirasi masyarakat	Dukungan substansi gugatan atas UU yang dimenangkan oleh DPR RI dan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	716.689.504.000	483.910.767.347
		237.684.746.000	177.547.601.695	

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

No.	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja Program (IKP/IKU)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
3.	Terwujudnya dukungan kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat	Dukungan peningkatan komunikasi antara anggota DPR RI dengan konstituennya dan terlaksananya diplomasi parlemen	1.450.943.752.000	1.397.665.010.407
4.	Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	Persentase tersedianya Naskah Akademik, draft RUU, keterangan DPR RI untuk sidang pengujian UU di MK yang digunakan oleh DPR RI Indeks kepuasan pengguna layanan	38.029.879.000	25.905.288.090
5.	Dokumen pertimbangan hukum dan litigasi DPR RI	Jumlah keterangan DPR dalam penanganan perkara di MK	Anggaran untuk indikator ini menggunakan anggaran sasaran 2 indikator dukungan substansi gugatan atas UU yang dimenangkan oleh DPR RI	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pengukuran kinerja realisasi anggaran untuk masing-masing IKU tidak dapat teridentifikasi dengan jelas, hal ini dikarenakan Penetapan IKU dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 kurang sesuai dan belum adanya sistem pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu, sebagai perbaikan sistem perencanaan kinerja dan anggaran, Setjen dan BK DPR RI perlu melakukan penyesuaian indikator sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan anggaran.



4 PENUTUP



Selama tahun 2016 Setjen dan BK DPR RI menjalankan 2 (dua) program kerja, yaitu : (1) Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI; dan (2) Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan. Secara umum capaian kinerja Setjen dan BK DPR RI dapat dikatakan meningkat, hal ini tercermin dari tercapainya target indikator kinerja atas sasaran strategis yang ditetapkan, yang dirinci sebagaimana tabel 27 berikut.

Tabel 28

Sasaran Strategis dan Persentase Capaian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal.	105,55%
2	Tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui dukungan pembentukan UU yang berkualitas, pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang sesuai aspirasi masyarakat	150%
3	Terwujudnya dukungan kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat	138,75%
4	Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	103,29%
5	Dokumen Pertimbangan Hukum dan Litigasi DPR RI	104%



Sasaran pada Rencana Strategis Setjen dan BK DPR RI Tahun 2016-2019 yaitu (1) meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal, dan (2) meningkatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal. Target Kinerja Tahun 2016, untuk kedua Sasaran tersebut telah terpenuhi. Capaian tersebut sebagaimana diuraikan pada Capaian Kinerja di Sasaran 1 dan 4.

Hasil capaian kinerja Sasaran yang ditetapkan seluruhnya telah memenuhi target dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan, namun untuk perbaikan kinerja kedepan, beberapa hal perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* sampai dengan level individu, sehingga setiap tindakan individu akan dapat selaras dengan strategi organisasi. Dalam penerapan hal tersebut dukungan dari Pimpinan sebagai pihak yang memiliki *power* tertinggi dalam organisasi sangat diperlukan karena dapat menggerakkan seluruh pegawai untuk ikut terlibat dan mensukseskan pengembangan dan implementasi *Balanced Scorecard*.
2. Kedepan perlunya dilakukan perbaikan dalam penyusunan renstra, Penetapan IKU, dan Penetapan Perjanjian Kinerja dalam bentuk rapat kerja Setjen dan BK DPR RI yang dihadiri mulai eselon I sampai dengan eselon III.
3. Melakukan *capacity building* dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mendapatkan pemahaman yang memadai dengan melakukan diskusi pakar, pelatihan-pelatihan menunjang yang diselenggarakan dari mulai tingkat Eselon I, Eselon II, serta bagi pegawai yang memiliki fungsi dalam mengelola kinerja dan APIP;
4. Membangun aplikasi pemantauan kinerja sehingga akan memudahkan mekanisme pemantauan kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja. Aplikasi tersebut harus terintegrasi dengan aplikasi keuangan sehingga informasi keuangan dan kinerja dapat digambarkan lebih komprehensif;
5. Monitoring dan evaluasi atas Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dan periodik secara bulanan atau triwulan.

LAPORAN KINERJA

2016



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

6. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berjenjang sehingga kinerja organisasi diturunkan (cascade) pada level eselon II, III, IV, hingga staf.
7. Menyusun rencana aksi atas pencapaian target kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja.

Demikian, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2016, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2017 dapat lebih baik.

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

LAMPIRAN





Lampiran 1

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016

SEKRETARIS JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SASARAN PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	
		KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU
1	2	3	4
1. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal.	1. Terasilitasinya persidangan Komisi-komisi, Paripurna, BURT, Banggar, Bamus, Baleg, MKD, BKSAP, dan Pimpinan DPR RI, serta terselenggaranya pemberitaan parlemen secara baik	95%	100%
	2. Tersedianya dukungan teknis dan administrasi, serta sarana dan prasarana yang memadai	90%	100%
	3. Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti secara baik	85%	100%
	4. Tersedianya referensi kepustakaan, infrastruktur teknologi informasi, kearsipan dan museum, risalah rapat persidangan, serta terselenggaranya pendidikan dan pelatihan SDM	90%	100%
	5. Mempertahankan hasil opini BPK berupa "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP)	100%	100%
	6. Meningkatnya penilaian LAKIP	B	100%
	7. Indeks kepuasan pengguna layanan	2,5 (Skala 5)	100%

LAPORAN KINERJA

2016



SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

SASARAN PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	
		KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU
1	2	3	4
2. Tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui dukungan pembentukan UU yang berkualitas, pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang sesuai aspirasi masyarakat	Dukungan substansi gugatan atas UU yang dimenangkan oleh DPR RI dan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	60%	100%
3. Terwujudnya dukungan kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat	Dukungan Peningkatan komunikasi antara Anggota DPR RI dengan konstituennya dan terlaksananya diplomasi parlemen	80%	100%
4. Menguatnya Kinerja Keahlian di Bidang Kedewanan yang Optimal	Persentase tersedianya Naskah Akademik/Draft Awal RUU/Kajian/Analisis/Referensi/Laporan di bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan serta isu-isu yang terkait Kedewanan	70%	100%
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	2,5 (Skala 5)	100%
5. Dokumen Perlindungan Hukum dan Litigasi DPR RI	Jumlah keterangan DPR dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi	50 Perkara	100%